

634. 97342

HAR

F 01

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
HUTAN MANGROVE DI KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN**



**Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat S-2**

Magister Ilmu Lingkungan

**Hardhani
L4K00013**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
Juni
2002**

TESIS

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
HUTAN MANGROVE DI KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN**

Disusun oleh

**Hardhani
L4K000013**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 29 Juni 2002
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama



Dr. Azis Nur Bambang, MS

Pembimbing Kedua



Dra. Sri Suryoko, M.Si



**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Lingkungan,**



Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

Judul Tesis : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan


Nama Mahasiswa : Hardhani

NIM : L4K000013

Program Studi : Magister Ilmu Lingkungan

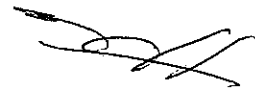
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 29 Juni 2002
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

1. Pembimbing Utama,



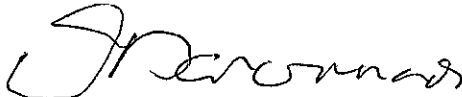
(Dr. Azis Nur Bambang, MS)

2. Pembimbing Kedua,



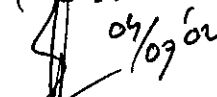
(Dra. Sri Suryoko, M.Si)

3. Penguji,



(Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES)

4. Penguji,



(Ir. Agus Hadiyanto, MT)



Ketua Program Studi
Magister Ilmu Lingkungan,



(Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2002

Hardhani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PENYUSUN:

N a m a : Hardhani
N I M : L4K000013
A l a m a t : Jln. Cinde Utara No. 46 RW XII RT 1
Semarang
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 1 April 1965
A g a m a : Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1971 s/d 1977 : SDN Achmad Yani Kotabaru
1978 s/d 1981 : SMTP Negeri 1 Kotabaru
1981 s/d 1984 : SMA Negeri 1 Kotabaru
1984 s/d 1990 : Universitas Achmad Yani Fakultas Pertanian
Banjarmasin

RIWAYAT PEKERJAAN:

1990 s/d 1992 : Staf pengajar Fakultas Pertanian
Universitas Achmad Yani Banjarmasin
1993 s/d sekarang : PNS Depdagri pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kemampuan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Dengan segala keterbatasan, tesis yang mengambil tema " Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan " ini dibuat untuk dapat mewujudkan salah satu hasil yang maksimal, sehingga maksud dan tujuan penelitian dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Azis Nur Bambang, MS, selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dra. Sri Suryoko, M.Si selaku pembimbing anggota yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES dan Bapak Ir. Agus Hadiyanto, MT ,selaku tim penguji yang telah memberikan saran, kritik dan pengarahan hingga dapat diselesaikan penulisan tesis ini.

Selain itu penulis menyatakan pula terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro beserta seluruh staf.
2. Pengelola dan seluruh Staf Dosen Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.
3. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru, selaku penanggung jawab Program Tugas Belajar penulis.
4. Isteri dan anak-anaku tercinta serta orang tua kami yang terhormat.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan rahmatNya kepada semua pihak atas budi baik yang telah diberikan.

Semarang, Juni 2002
Penulis,

Hardhani
L4K000013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
INTISARI	viii
ABSTRAK	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Perumusan Masalah	9
2. Keaslian Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Telaah Kepustakaan	13
1. Pengertian Hutan Mangrove	13
2. Fungsi dan Peranan Hutan Mangrove	14
3. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove.....	17
4. Pendidikan Dan Keluarga	24
5. Pendapatan Per Kapita	25
B. Landasan Teori	27
C. Asumsi dan Hipotesis Penelitian	28
BAB III. METODE PENELITIAN	30
A. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	30
1. Populasi	31
2. Sampel dan Teknik Sampling	31
B. Jenis dan Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Pengolahan Data	33
E. Analisis Data	34
F. Definisi Operasional dan Pengukuran	35
BAB IV. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN.....	39
1. Letak Wilayah	39
2. Batas Administrasi	41
3. Iklim	43
4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	44
5. Gambaran Umum Hutan Mangrove.....	44

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Hasil Penelitian.....	54
Karakteristik Responden	54
1. Jenis Kelamin Responden	54
2. Umur responden	55
3. Jenis Pekerjaan Responden	56
4. Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga	57
5. Tingkat Pendapatan Perkapita Responden.....	60
6. Jumlah Anggota Keluarga Responden.....	62
7. Pengetahuan Responden	64
8. Kebijakan dan Himbauan Pemda	66
B. Pembahasan	69
1. Tingkat Peran Serta responden	70
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove	82
3. Kontribusi Faktor-Faktor terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove..	91
C. Implikasi Perencanaan Pemantapan Pengelolaan Hutan Mangrove Di Kabupaten Kotabaru.....	96
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran-Saran.....	104
 RINGKASAN.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Persebaran sampel responden per desa per kelurahan Di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru	32
2. Luas kelurahan/desa dan persentasi luas kecamatan Pulau Laut Utara tahun 2000	40
3. Luas (Ha) kelas ketinggian di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru	42
4. Luas (Ha) kelas lereng di Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru	43
5. Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin	54
6. Komposisi responden berdasarkan jenis umur	56
7. Komposisi responden berdasarkan jenis pekerjaan	56
8. Komposisi responden berdasarkan tingkat pendidikan	58
9. Komposisi responden berdasarkan tingkat pendapatan Perkapita	56
10. Komposisi responden berdasarkan jumlah anggota keluarga	63
11. Kategorisasi pengetahuan responden tentang mangrove dalam pengelolaan hutan mangrove	65
12. Kategorisasi respon ketaatan, kepatuhan terhadap Kebijakan dan himbauan pemda dalam pengelolaan Hutan mangrove	68
13. Kategorisasi tingkat peran serta masyarakat dalam Pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru	76
14. Rerata skor tingkat peran serta masyarakat berdasarkan Tingkat pendidikan	78
15. Rerata skor tingkat peran serta masyarakat berdasarkan Jenis pekerjaan	79
16. Rerata skor tingkat peran serta masyarakat berdasarkan Pendapatan perkapita	80
17. Komposisi responden berdasarkan tingkat peran serta Dalam pengelolaan hutan mangrove di masing-masing Desa/kelurahan di Kecamatan Pulau Laut Utara	81
18. Rangkuman analisa uji korelasi dan regresi berganda Faktor-faktor terhadap peran serta masyarakat dalam Pengelolaan hutan mangrove	93
19. Analisa varian kontribusi faktor-faktor terhadap peran Sera masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove	96

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Bagan Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation	22
2. Skematis hubungan antara faktor-faktor yang saling berpengaruh terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru	27
3. Kondisi hutan mangrove yang masih baik/utuh	45
4. Hamparan mangrove di pesisir Selat Laut Kecamatan Pulau Laut Utara dengan kondisi masih baik/utuh	47
5. Konversi hutan mangrove menjadi pemukiman masyarakat	48
6. Konversi hutan mangrove menjadi areal pertambakan	48
7. Hutan mangrove rusak dan lahannya dibiarkan saja	49
8. Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyuluhan Pelestarian hutan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru	51
9. Peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove Di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru	52
10. Peran serta masyarakat dalam kegiatan penanaman Hutan mangrove di Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru	52

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Peta lokasi penelitian	L-1
2. Penelitian-penelitian sebelumnya dan yang dilaksanakan	L-2
3. Angket penelitian untuk responden	L-3
4. Kategori responden berdasarkan tingkat pengetahuan mangrove	L-9
5. Kategori responden berdasarkan kebijaksanaan dan himbauan pemda dalam pengelolaan hutan mangrove	L-10
6. Kategori responden berdasarkan tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove	L-12
7. Keterangan berkas data penelitian dan analisis data	L-13
8. Statistik deskriptif	L-19
9. Tabel matrik korelasi	L-23
10. Analisa regresi umum parsial	L-24
11. Analisa regresi berganda	L-30

INTISARI

Penelitian ini berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove, dan beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian lapangan dilaksanakan dengan menerapkan penelitian survai. Populasi yang diteliti adalah kepala rumah tangga masyarakat pesisir yang terdiri dari 6 desa/kelurahan dalam Kecamatan Pulau Laut Utara sebanyak 6.824 KK. Sampel diambil secara proporsional random sampling dengan cara pengambilan sampel berlapis sebanyak 100 KK. Pengumpulan datanya menggunakan angket yang dilengkapi dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif dan metode statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) warga masyarakat Kecamatan Pulau Laut Utara telah berperan serta dalam pengelolaan hutan mangrove, dengan rerata skornya sebesar 21,490. Responden yang memiliki tingkat peran serta tinggi adalah sebagai PNS/ABRI, diikuti pensiunan, pedagang dan yang terendah adalah bidang jasa, buruh industri/bangunan dan nelayan, (2) variabel pendidikan, pendapatan, pengetahuan mangrove dan kebijaksanaan dan himbuan pemda masing-masing mempunyai korelasi dan pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Variabel tingkat pendidikan formal dengan nilai $r = 0,831$ dengan nilai t test sebesar $14,787 > t$ tabel = 2,576, dan $R^2 = 0,691$, tingkat pendapatan dengan nilai $r = 0,712$ dan $R^2 = 0,507$ dengan nilai t test sebesar $10,038 > t$ tabel = 2,576, tingkat pengetahuan responden dengan nilai $r = 0,844$ dan $R^2 = 0,712$ dengan nilai t test sebesar $15,554 > t$ tabel = 2,576 dan variabel kebijaksanaan dan himbuan pemda mempunyai nilai $r = 0,849$ dan $R^2 = 0,721$ dengan nilai t test sebesar $15,902 > t$ tabel = 2,576. Sedangkan variabel jumlah anggota keluarga menunjukkan adanya korelasi negatif dimana nilai r sebesar $-0,047$ dan $R^2 = 0,221$ dengan nilai t test sebesar $0,464 < t$ tabel = 1,960 adanya pengaruh negatif ini dari faktor jumlah anggota keluarga dengan tingkat peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove, artinya makin banyak jumlah anggota keluarga, maka tingkat peran sertanya makin rendah. Sebaliknya dengan makin sedikit jumlah anggota keluarga tersebut maka tingkat peran sertanya makin tinggi. (3) Kebijaksanaan dan himbuan pemda merupakan faktor yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap tingkat peran serta, kemudian diikuti oleh tingkat pendidikan, pengetahuan tentang mangrove, tingkat pendapatan dan yang terendah adalah jumlah anggota keluarga. Analisis varian kontribusi faktor-faktor terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove menunjukkan nilai F test sebesar $103,613 > F$ tabel = 6,85 (sangat nyata).

ABSTRACT

This research was about the factors that influenced the participation of society on the management of mangrove in North Sea Island Subdistrict, Kotabaru Regency of South Borneo. It was conducted in order to know the participation of society on the management of mangrove, and some influential factors.

The field research was done with survey. The object of the research was the leaders of families in a coastal society that has six villages. There were 6, 824 families in North Sea Island Subdistrict. Sample was taken with a proportional random sampling through a stratified sampling for 100 families. Data was collected by questionnaire, interview, and documentation. The data was analyzed using qualitative method and statistic method.

The result indicated that : (1) the society in North Sea Island Subdistrict had a participation on the management of mangrove, in the average score 21,490. The respondents that had a high level of participation were government officers and armies, then followed by some retired people, sellers, and the lowest level were people who worked in the area of services, labors, and fishermen, (2) each variable liked the education, the income, the knowledge of mangrove, the government policy and appeal had a positive correlation and influence that was very significant to the increase of society participation on the management of mangrove. The variables liked the level of formal education, $r = 0.831$ and t test = 14.787. It was $> t$ table = 2.576, and $R^2 = 0.691$; the level of income, $r = 0.712$ and $R^2 = 0.507$, the t test = 10.038. It was $> t$ table = 2.576; the level of respondent knowledge, $r = 0.844$ and $R^2 = 0.712$, t test = 15.554. It was $> t$ table = 2.576, and the variable of the government policy and appeal $r = 0.849$ and $R^2 = 0.721$, t test = 15.902; It was $> t$ table = 2.576. Meanwhile, the variable of the family member number showed a negative correlation with r value = -0.047 and $R^2 = 0.221$, t test = 0.464. It was $< t$ table = 1.960. The negative influence from the factor of the family member number in participating on the management of mangrove meant the more family member number, the participation was lower. Otherwise, the less family member number, the participation was higher. (3) The government policy and appeal were the main factor in contributing to the level of participation, then followed by the levels of education, the knowledge of mangrove, the income and the family member number as the lowest level. Variant Analysis was contributed from some factors to the participation of society on the management of mangrove showed F test 103.613. It was $> F$ table = 6.85 (very significant).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup, perlu dijaga keserasiannya antar berbagai usaha kegiatan. Setiap usaha atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin.

Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup di dunia ditandai dengan dimulainya kesepakatan semua negara Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup Di Stockholm tanggal 15 – 16 Juni 1972. Hasil Pertemuan inilah yang sekarang ini menjadi arah dalam menangani lingkungan.

Di Indonesia, perkembangan secara konkrit diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, 10 tahun setelah Deklerasi Stockholm 1972. Karena kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang, sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam UULH telah disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dengan diundangkannya Undang-Undang

RI Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 19 september 1997.

Sebagai kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup tertuang pada:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4.
2. Di dalam ketentuan ini mempunyai makna bahwa Kewajiban Negara dan Tugas Pemerintah untuk melindungi sumber-sumber alam guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.

3. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945:

Dalam pasal ini pemikiran dasar dirumuskan lebih konkrit yaitu memberikan hak perusahaan kepada Negara atas seluruh sumberdaya alam Di Indonesia dan memberikan kewajiban kepada Negara untuk menggunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4. Garis-Garis Besar Haluan Negara

Dari ketentuan dasar seperti disebut di muka, maka penjabaran secara konkrit pertama kali dituangkan pada GBHN tahun 1973 (PELITA II) hingga GBHN 1998 yang menjadi arah kebijaksanaan dalam pelaksanaan PELITA VII ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan pasal 3 menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan azas tanggung jawab negara, azas berkelanjutan, serta azas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup, dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya pasal 4 dari Undang-Undang yang sama mengatakan, bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Terjaminnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana;
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan RI dari dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Kewenangan dan mekanisme pengelolaan lingkungan hidup merupakan aspek penting yang tercantum dalam UUPLH 23 tahun 1997. Disebutkan mulai dari pasal 8 sampai pasal 13, tentang kewenangan, kewajiban, dan tugas Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Empat butir penting yang perlu dipahami dalam konteks ini.

Butir pertama menyangkut penegasan bahwa negara mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lingkungan (pasal 8). Pasal ini tentunya

dilandasi oleh pasal 33 UUD 45 yang menegaskan bahwa sumberdaya alam dikuasai Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penting dicatat disini bahwa meskipun negara mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan lingkungan, kewenangan ini ditujukan tidak lain untuk kemakmuran rakyat.

Butir kedua yang penting menyangkut penegasan bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan bahwa kebijaksanaan ini harus dilakukan secara terpadu oleh semua Instansi Pemerintah (pasal 9) UUPLH No. 23 tahun 1997. Butir ini mengandung makna bahwa tugas dan pelaksanaan pengelolaan tidak hanya merupakan tugas satu atau dua instansi saja, melainkan merupakan tugas dan tanggung jawab semua Instansi Pemerintah sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing.

Selanjutnya, butir ketiga yang penting dalam konteks kewenangan pengelolaan lingkungan ini berkaitan dengan desentralisasi pengelolaan lingkungan, dalam arti penyerahan beberapa kewenangan dan urusan pengelolaan lingkungan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (pasal 12 dan 13). Butir ini perlu dicermati lebih lanjut, oleh karena memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah daerah untuk dapat secara langsung mengembangkan berbagai mekanisme pengelolaan lingkungan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Kewenangan Pemerintah daerah ini sangat

penting karena memungkinkan dikembangkannya *opsi-opsi pengelolaan lingkungan secara lokal*, yang mungkin telah terbukti efektif dipraktikkan di berbagai daerah.

Butir keempat, dalam UUPH No. 23 tahun 1997 ini menegaskan secara eksplisit tentang *hak masyarakat untuk berperan* secara aktif dalam berbagai pengelolaan lingkungan hidup (pasal 5, 6 dan 7). Butir ini menjadi semakin penting, terutama dalam semangat reformasi yang saat ini terus digulirkan, terutama menyangkut ide tentang perlunya dikembalikan kedaulatan rakyat yang selama ini cenderung diabaikan.

Peran serta masyarakat merupakan proses dimana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan tentang apa yang akan direncanakan/dilakukan, program dan kebijakan. Keikutsertaan masyarakat sangat penting dalam menyusun suatu perencanaan. Pentingnya peran serta masyarakat tersebut didasarkan atas beberapa alasan. Pertama, masyarakat berhak mengetahui tentang setiap rencana pembangunan yang secara potensial mempengaruhi kehidupan mereka, kedua masyarakat adalah local expert tentang lingkungan di sekitarnya, sehingga dalam penyusunan perencanaan pendapat dan gagasan masyarakat layak didengar, agar tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan akan workable.

Berbagai masalah lingkungan yang timbul disebabkan karena berbagai sumber, namun demikian masalah lingkungan sebenarnya terkait dengan masalah perilaku dan tanggung jawab manusia dalam

kapasitasnya sebagai individu atau sebagai lembaga/badan hukum secara keseluruhan.

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat sehingga terbentuk rasa tanggung jawab yang tercermin dalam perilaku manusia, maka diperlukan pengembangan partisipasi masyarakat. Masyarakat disini dapat dilihat dari dua sisi : pertama masyarakat masih belum peduli terhadap pentingnya menjaga fungsi ekologis lingkungan hidup dan kedua adalah masyarakat yang sudah peduli lingkungan dan potensial untuk merubah sikap perilaku masyarakat yang belum sadar lingkungan. Pengembangan peran serta masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya melainkan dengan program secara berkelanjutan untuk menanamkan kesadaran masyarakat dengan cara mengembangkan, memberikan rangsangan, memelihara dan dengan menciptakan iklim yang kondusif disertai pemberian ruang gerak dan akses yang memadai.

Kabupaten Kotabaru adalah salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 14.489,69 KM² (35,27%) dari luas wilayah Kalimantan Selatan yang wilayahnya didominasi oleh perairan laut serta salah satu diantara 3 (tiga) kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai garis pantai yang panjang (Kotabaru Dalam Angka, 2000). Kabupaten Kotabaru terdiri dari 20 kecamatan, satu diantaranya, yaitu Kecamatan Pulau Laut Utara yang terletak di wilayah pesisir Selat Laut. Kecamatan ini sangat potensial dan sedang mengalami perkembangan. Kecamatan Pulau Laut Utara dimana Ibukota Kabupaten

Kotabaru berada dan dewasa ini berfungsi sebagai kota pemerintahan, pendidikan, industri dan berbagai fasilitas perkotaan tumbuh dan berkembang.

Perkembangan kecamatan tersebut relatif lebih cepat dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya karena pertumbuhan penduduk yang tinggi, hingga mengakibatkan tingginya berbagai kebutuhan, misalnya kebutuhan akan lahan untuk penyediaan tempat tinggal keluarga dan berbagai kegiatan lainnya, khususnya untuk kegiatan budidaya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penguasaan lahan pada kawasan hutan mangrove atau non budidaya untuk kawasan budidaya. Dampak lanjutan dari keadaan tersebut adalah terjadi perusakan kawasan-kawasan berfungsi lindung, diantaranya yang terjadi adalah rusaknya hutan mangrove (hutan bakau). Kondisi hutan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Utara tersebut umumnya dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan.

Perkembangan yang pesat akan menimbulkan benturan dalam segala aspek diantaranya adalah aspek lingkungan. Dewasa ini telah menjadi anggapan umum bahwa mangrove merupakan tanaman pelindung pantai, karena dengan struktur akarnya yang sedemikian rupa dan daya dukung yang dimilikinya, dapat menjadi perangkap lumpur dan pemecah gelombang. Disamping itu, oleh lebatnya tegakan, hutan mangrove dapat berperan sebagai penangkis angin, penghasil penting bahan organik dan hara bagi ekosistem akuatik yang bersangkutan, bertugas sebagai daerah

pembiakan bagi berbagai binatang terutama ikan dan udang, hutan mangrove dapat menyaring bahan-bahan pencemar dan hara yang dapat masuk ke wilayah dekat pantai dan tentunya masih banyak fungsi-fungsi lain yang dimilikinya sebagai tanaman ekosistem pantai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mencoba mengangkat permasalahan Peran Serta Masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam yakni hutan mangrove dari pengrusakan yang tidak terkendali secara besar-besaran disepanjang pesisir Selat Pulau Laut Kotabaru Kalimantan Selatan.

Kebijakan pemerintah dan berbagai upaya yang telah dilakukan pada prinsipnya dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, di bidang lingkungan hidup khususnya dalam hal pengelolaan hutan mangrove. Namun demikian berbagai macam kebijakan pemerintah tersebut tampaknya belum sepenuhnya mampu mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan mangrove. Oleh karena itu, maka peran serta masyarakat masih membutuhkan perhatian serius dari semua pihak yang terkait. Hal ini penting untuk menghindari kecenderungan terjadinya *partisipasi semu* (pseudo participation) dari warga masyarakat. Dalam konteks peran serta semacam ini, berarti bahwa warga masyarakat tidak mengerti dan paham tentang apa dan untuk apa mereka harus melakukan suatu kegiatan pembangunan, atau lebih spesifik lagi dalam mengelola hutan mangrove.

1. Perumusan Masalah

Permasalahan lingkungan hidup pada umumnya timbul oleh beberapa kondisi antara lain:

1. Dinamika penduduk ;
2. Pemanfaatan sumberdaya alam yang kurang bijaksana ;
3. Kurang terkendalinya IPTEK ;
4. Dampak negatif dari dari kemajuan pembangunan ;
5. Benturan tata ruang.

Adanya aktifitas pembangunan fisik di wilayah pesisir pantai dan adanya krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ternyata memberikan dampak negatif terhadap keberadaan hutan mangrove di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Disatu sisi Kedaan tersebut memicu masyarakat untuk membuat pertambakan perairan darat dan fasilitas lainnya yang berdampak pada pembabatan hutan bakau secara besar-besaran disepanjang pesisir pantai selat Pulau Laut Kotabaru dan di lain sisi masyarakat khususnya masyarakat pesisir memiliki ketergantungan terhadap keberadaan hutan mangrove, dimana antara lain kayunya untuk keperluan bahan bakar memasak dan untuk kontruksi bangunan rumah tempat tinggal mereka dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diteliti penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.
2. Bagaimanakah faktor-faktor peran serta masyarakat dalam mencegah kerusakan hutan mangrove tersebut, baik faktor yang menghambat ataupun faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan peran serta masyarakat.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas , maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat peran serta masyarakat pesisir Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dalam hal pengelolaan hutan mangrove.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran serta masyarakat pesisir Kabupaten Kotabaru dalam pengelolaan hutan mangrove.

2. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang mangrove sebenarnya telah banyak dilakukan, secara umum dapat dikatakan, bahwa ekosistem mangrove telah banyak

diteliti, namun penekannya lebih pada segi biologi, pendayagunaan, inventarisasi, silvikultur dan ekologi .

Penelitian dengan penekanan pada aspek faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove, merupakan penelitian lanjutan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, disamping itu juga pada lokasi penelitian, penelitian sejenis ini belum pernah dilakukan.

Penelitian ini terutama ditekankan pada hubungan antara faktor-faktor peran serta masyarakat dengan pengelolaan hutan mangrove. Kekhususan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas faktor-faktor peran serta masyarakat terhadap pengelolaan mangrove di lingkungan pesisir kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Sebagai perbandingan dengan penelitian yang pernah ada, serta untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, maka pada Lampiran 1 disajikan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan penelitian yang dilakukan penulis. Hal yang dapat dilihat dari penelitian-penelitian tersebut meliputi: peneliti, tahun, daerah, tujuan dan metode.

3. Manfaat Penelitian

Kompleknya permasalahan lingkungan hidup menuntut setiap komponen masyarakat untuk dapat memahami dan menanganinya secara cermat dan ilmiah. Karena itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk anatara lain :

1. Sebagai sumbangan bagi pengembangan pengetahuan dalam kaitannya dengan peningkatan motivasi dan peran serta masyarakat dalam semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan mangrove;
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah pada umumnya, khususnya Pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan dalam menetapkan kebijaksanaan dan langkah-langkah operasional pengelolaan hutan mangrove (kawasan cagar alam);
3. Sebagai bahan acuan dan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud mengadakan penelitian sejenis di tempat lain.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Mengkaji tingkat peran serta masyarakat pesisir dalam pengelolaan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.
2. Mengkaji faktor-faktor peranserta masyarakat pesisir yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Kepustakaan

1. Pengertian Hutan Mangrove

Ekosistem mangrove adalah suatu ekosistem yang berkembang di daerah pantai yang berair tenang dan terlindung dari pengaruh ombak besar serta eksistensinya bergantung pada adanya aliran air laut dan aliran air tawar dari darat. Komponen tumbuhan sebagian besar berupa jenis-jenis pohon *halophyt* yang keanekaragamannya jauh lebih kecil daripada ekosistem hutan darat. Komponen hewan sebagian besar berupa hewan *avertebrata* (hewan tidak bertulang belakang). Sebagian besar biota ini biota ini hanya terdapat dalam ekosistem mangrove dan sebagian kecil terdapat juga pada ekosistem lainnya. Ekosistem mangrove berbatasan dengan darat pada batas jangkauan air pasang tertinggi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor laut dan darat (Hamilton et al., 1984).

Menurut Saenger (1993), hutan mangrove sering pula disebut sebagai hutan bakau atau hutan payau. Dinamakan hutan bakau oleh karena sebagian besar vegetasinya didominasi oleh jebis bakau (*Rhizophora spp.*), dan disebut hutan payau oleh karena hutannya tumbuh diatas tanah yang selalu tergenang oleh air payau. Arti kata mangrove itu sendiri digunakan untuk masyarakat tumbuh-tumbuhan (*Hidrosere communities*) dari beberapa species. Tanaman ini selalu hijau dan terdiri dari

bermacam-macam campuran yang mempunyai nilai ekonomis tinggi karena keadaan yang tidak sama dan sifat-sifat fisiologis dari tumbuh-tumbuhan. Kebanyakan dari tumbuhan mangrove mempunyai akar napas (*pneumatophores*).

Steenis (Hardjosuwarno, 1993) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh diantara garis pasang surut, sehingga hutan mangrove dinamakan juga hutan pasang. Hutan mangrove terjadi di daerah pantai yang terus menerus atau berurutan terbenam dalam air laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Tanahnya terdiri dari pasir dan lumpur.

Odum (1971) mengemukakan salah satu komunitas laut dangkal yang sangat menarik dan khas dari perairan tropika dan sub tropika yang pantas disebut secara khusus adalah rawa bakau (mangrove). Bakau adalah salah satu diantara sedikit tumbuh-tumbuhan tanah timbul yang tahan terhadap salinitas laut terbuka.

2. Fungsi dan Peranan Hutan Mangrove

Clark (1974), mengemukakan bahwa peranan hutan mangrove secara umum adalah sebagai zone penyangga stabilitas ekosistem pantai. Peran mangrove secara khusus, yang tidak bisa digantikan oleh ekosistem lain adalah fungsi gandanya yaitu fungsi fisik dan fungsi biologisnya. Fungsi fisik disebutkan oleh Knox dan Miyabara (1984) sebagai pelindung pantai dari pukulan gelombang laut. Hal ini dikarenakan masa dari batang

pohon, daun-daunan dan sistem perakaran berfungsi sebagai penghalang secara fisik dari serangan gelombang dan badai, seperti angin topan dan badai tropis. Selain itu mangrove dapat membantu menstabilkan sedimen dan membantu meningkatkan akumulasi sedimen lokal.

Sementara itu fungsi biologisnya telah disebutkan oleh Odum (1971), sebagai habitat bertelur, memelihara dan membesarkan anak-anak pelbagai jenis satwa, memelihara sumber makanan dan pertumbuhan bagi species-species biota laut. Oleh karena mangrove merupakan penghasil zat organik yang produktif, sehingga merupakan mata rantai utama dalam jaring-jaring makanan ekosistem pantai.

Hutan mangrove yang merupakan ekosistem peralihan antara darat dan laut, sebenarnya sudah cukup lama diketahui mempunyai multi fungsi dan merupakan mata rantai yang sangat penting dalam memelihara keseimbangan siklus biologi suatu perairan. Ditinjau dari segi potensinya, maka hutan mangrove dibedakan menjadi 2 aspek, yaitu potensi ekologis dan potensi ekonomis.

Secara ekologis hutan mangrove berperan sekali dalam kemampuannya mendukung eksistensi lingkungan fisik dan lingkungan biota. Di dalam lingkungan fisik berperan sebagai penahan ombak, penahan angin, pengendali banjir, peredam pencemaran/polusi dan penahan intrusi air asin, sedangkan peranannya di dalam lingkungan biota sebagai tempat persembunyian, tempat memijah atau berkembang biaknya jenis biota air (termasuk ikan dan udang), mamalia dan burung.

Potensi ekonomis ditunjukkan dengan kemampuannya dalam menyediakan produk yang dapat diukur dengan uang. Salah satu produk dari hutan mangrove yang secara ekonomis potensial dapat langsung diambil adalah kayunya.

Menurut Nyabakken (1992), hutan mangrove mempunyai pengaruh terhadap kandungan air, sidimen dan partikel lainnya yang dilimpaskan dari daratan. Selain itu hutan mangrove juga berpengaruh terhadap transport partikel dan gerakan pasang surut yang datang dari laut lepas. Karena struktur akar mangrove yang khas, akar-akar tersebut dapat memperlambat gerakan masa air, yang pada gilirannya memungkinkan partikel sedimen mengendap ke dasar perairan. Hasilnya berupa lumpur, sehingga substrat dasar perairan daerah mangrove berupa lumpur. Dasar perairan di daerah ini kaya akan bakteri yang menimbulkan kondisi anoksik, kandungan oksigen rendah dan salinitas tinggi.

Hardjosuwarno (1993) mengemukakan, bahwa peranan sebagai fungsi lindung ditunjukkan oleh hutan mangrove di sepanjang pantai, sebagai penangkis gelombang laut, sehingga melindungi pantai dari hempasan gelombang. Disamping itu juga mangrove memiliki pula kemampuan memperbaiki tanah yang disebabkan oleh bentuk sistem perakarannya yang berfungsi :

- a. menenangkan pergerakan air yang berkelanjutan;
- b. menahan kembalinya atau terhanyutnya bahan organik dan lumpur dari sungai ke laut;

c. menguatkan garis-garis pantai.

3. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

Hubungan manusia dengan lingkungannya ternyata tidak hanya berjalan sebelah, tetapi antara manusia dengan lingkungannya terdapat hubungan yang saling timbal balik. Lingkungan dapat mempengaruhi individu melalui rangsangan atau stimulus yang berasal dari lingkungan itu dan manusia juga dapat memberikan pengaruh kepada lingkungan melalui respon atau tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya (Soemarwoto, 1994).

Prilaku manusia pada dasarnya terjadi sebagai tanggapan terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di luar diri manusia. Tanggapan terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan tersebut akan menentukan persepsi dan sikap pada individu sebagai reaksi terhadap stimulus yang sama.

Persepsi merupakan suatu pemahaman yang dapat ditumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, menghargai dan memanfaatkan sesuatu. Obyek lingkungan perlu ditata, dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sumber kegiatan masyarakat, bilamana masyarakat memiliki persepsi yang baik, sehingga keberadaan obyek lingkungan tersebut dapat dirasa kemanfaatannya.

Menurut Ancok (1992) terdapat anggapan bahwa dengan adanya pengetahuan terhadap manfaat suatu hal, akan menyebabkan seseorang

mempunyai sikap positif terhadap hal tersebut. Selanjutnya, sikap positif seseorang akan mempengaruhi niat berperan serta pada kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pentingnya peran serta masyarakat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dinyatakan bahwa peran serta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus makin meluas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan ataupun pula dalam menerima hasil pembangunan. Untuk itu perlu diciptakan suasana kemasyarakatan yang mendukung cita-cita pembangunan, serta terwujudnya kreativitas dan aktivitas dikalangan rakyat.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik tahap perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian. Dengan adanya peran serta tersebut anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan yang termuat dalam GBHN maupun ketentuan Pasal 7 UUPH tersebut merupakan landasan

hukum yang kuat terhadap perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Cohen dan Up Hoff (1979) ada empat jenis peran serta (participation) yakni; (1) peran serta dalam pengambilan keputusan, (2) peran serta dalam pelaksanaan, (3) peran serta dalam pengambilan manfaat, dan (4) peran serta dalam evaluasi. Keempat jenis peran serta tersebut juga dilakukan secara bersama-sama atau keseluruhan akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial. Menurutnya bahwa konsep peran serta yang diidentifikasi ini dapat berbeda-beda atau beragam tergantung pada cara pandang dan latar belakang yang berbeda-beda.

Peran serta masyarakat ini setidaknya-tidaknya menjadi penting untuk empat hal ; (1) memberi informasi atau input kepada pemerintah, (2) meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan sehingga dapat mengurangi timbulnya pertentangan, (3) membantu perlindungan hukum, (4) mendemokratisasikan pengambilan keputusan (Hardjasoemantri, 1993). Menurut Hadi (1995) dari segi kualitas, partisipasi atau peran serta masyarakat penting sebagai : (a) input atau masukan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan, (b) strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat sehingga kredibilitas keputusan akan sah, (c) komunikasi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat, aspirasi dan concern masyarakat, (d) media pemecahan masalah untuk mengurangi

ketegangan dan memecahkan konflik untuk memperoleh konsesus, (e) terapi sosial untuk menyembuhkan penyakit sosial seperti rasa keterasingan (alination), rasa kurang percaya diri (powerlessness).

Menurut Sastropetro (1986) pentingnya peran serta atau partisipasi masyarakat yakni (1) untuk lebih meningkatkan hasil kerja, (2) pelayanan atau servis dapat diberikan dengan biaya murah, (3) mendorong timbulnya rasa tanggung jawab, (4) sebagai katalisator untuk pembangunan selanjutnya, (5) menjamin dan menghimpun bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah dilibatkan, (6) menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat dalam masyarakat sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian, (7) membebaskan orang dari ketergantungan kepada keahlian orang lain.

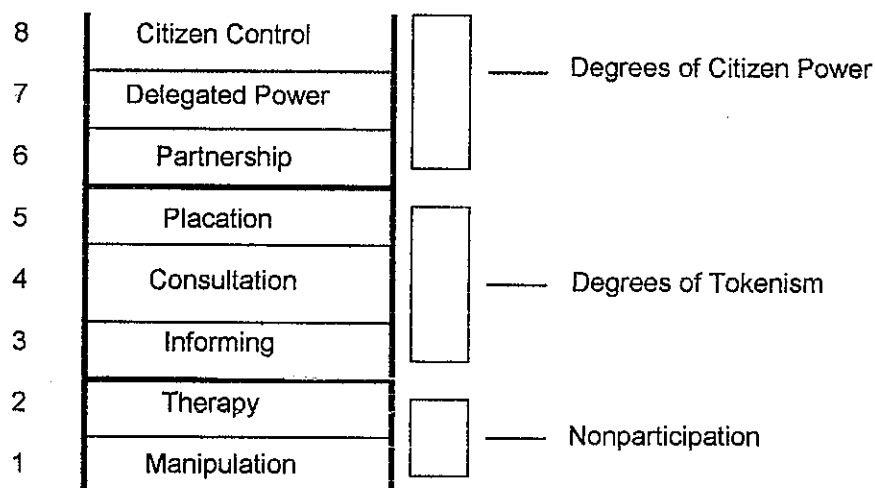
Disamping itu menurut Hardjasoemantri (1993) sebagai umpan baliknya, peran serta masyarakat juga memerlukan penyaluran informasi kepada masyarakat dengan maksud untuk memberikan (1) pemastian penerimaan informasi, (2) informasi lintas batas atau transfrontier information, (3) Informasi tepat waktu atau timely information, (4) informasi lengkap atau comprehensive information, (5) informasi yang dapat dipahami atau comprehensible information. Guna lebih mengefektifkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ini diperlukan syarat-syarat antara lain (1) pemimpin eksekutif yang terbuka, (2) peraturan yang akomodatif, (3) masyarakat yang sadar lingkungan, (4) lembaga swadaya masyarakat yang tanggap, (5) informasi yang tepat,

dan (6) keterpaduan antar semua komponen baik secara horizontal maupun secara vertikal.

Menurut Davis (1977) bahwa peran serta (*participation*) merupakan keterlibatan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong dirinya untuk memberi sumbangan bagi tercapainya tujuan dan membagi tanggung jawab diantara mereka. Berangkat dari pengertian tersebut, ada tiga hal pokok bahwa ; (1) peran serta itu merupakan keterlibatan mental dan emosi, artinya bukan hanya aktivitas lahiriah semata tetapi juga secara psikologis , (2) peran serta merupakan motivasi seseorang memberikan sumbangan (*motivation to contribution*) yang terlahir dalam kesempatan untuk menyumbangkan inisiatif dan kreativitas ke arah tercapainya tujuan. Artinya, peran serta tidak sekedar memberikan persetujuan atau sesuatu yang harus diputuskan tetapi lebih dari itu merupakan dinamika sosiopsikologis antar warga masyarakat, (3) peran serta merupakan penerimaan tanggung jawab bersama (*acceptance of responsibility*) dalam aktivitas hidup bermasyarakat. Artinya peran serta merupakan proses sosial dimana mereka ingin menyertakan dirinya dalam setiap aktivitas sosial kemasyarakatan, termasuk dalam konteks pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Kotabaru Kalimantan selatan. Adanya peran serta seperti ini diharapkan dapat memberikan motivasi sehingga masing-masing warga masyarakat lebih bertanggung jawab secara sosial atas warga masyarakat lainnya di lingkungannya daripada sekedar tanggung jawab yang bersifat mekanis.

Peran serta masyarakat menjadi sangat penting mengingat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas, tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran serta sangat efektif dan dapat melampaui kemampuan orang seorang baik dari sudut kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup (Hardjasoemantri, 1993).

Arnstein (1969), menguraikan perbedaan peran serta berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan. Melalui artikelnya yang berjudul "Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation" menerangkan perbedaan antara peran serta yang sumir dengan "real" peran serta yang mempengaruhi hasil dari peran serta dalam perencanaan, dalam Gambar 1 nampak sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation (Arnstein, Sherry R., 1969)

Dari Gambar 1 di atas diterangkan sebagai berikut; pada tingkat yang paling bawah (1) manipulation dan (2) therapy disimpulkan sebagai tingkat yang bukan peran serta atau "non-participation". Tujuan dari model ini bukan untuk memberi kemampuan masyarakat untuk berperan serta tetapi untuk mengempakan pemegang kekuasaan untuk mendidik dan mengobati para peserta dalam peran serta. Tingkat (3) informing dan (4) consultation disebut sebagai tingkatan "tokenisme" atau sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat untuk mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara. Namun demikian pendapat mereka belum tentu menjadi bahan bagi pengambilan keputusan. Bentuk yang ke (5) placation dipandang sebagai tokenisme pada tingkat yang lebih tinggi dimana masyarakat memiliki hak untuk memberikan "advice" tetapi kekuasaan untuk pengambilan keputusan tetap ditangan pemrakarsa. Pada tingkat ke (6) partnership, masyarakat memiliki ruang untuk bernegosiasi dan terlibat dalam "trade-off" dengan para pemegang kekuasaan. Pada tingkat (7) delegated power dan (8) citizen control, masyarakat memiliki kekuatan mayoritas untuk mengambil keputusan.

Cakupan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove merujuk pada ketentuan UUPH Nomor 23 Tahun 1997 yakni (1) peran serta pada tahap perencanaan, (2) peran serta pada tahap pelaksanaan kegiatan, (3) peran serta pada tahapan evaluasi kegiatan. Secara garis besar, dari tiga cakupan peran serta di atas, khususnya untuk peran serta masyarakat pada tahap pelaksanaan akan dilihat dari aspek pengelolaan

menurut UU No. 23/1997 Pasal 1 ayat (2) dalam hal (1) pemanfaatan, (2) penataan, (3) pemeliharaan, (4) pengawasan, (5) pengendalian, (6) pemulihan dan (7) pengembangan. Terlaksananya kegiatan tersebut diharapkan kelestarian hutan mangrove di Kabupaten Kotabaru akan dapat dipertahankan serta terlaksananya pengelolaan hutan mangrove yang terarah dan terprogram.

4. Pendidikan dan Keluarga

Swiff (1989) berpendapat bahwa pendidikan adalah sesuatu yang terjadi di masyarakat dan merupakan proses atau cara seseorang memperoleh dan menghasilkan kemampuan fisik, moral dan sosial yang dituntut daripadanya oleh oleh kelompok tempatnya dilahirkan dan dibesarkan dan harus berfungsi sebagai proses sosial.

Durkheim dan Said (1989) berpendapat bahwa pendidikan adalah pengaruh yang dilaksanakan oleh orang dewasa atas generasi yang belum matang untuk penghidupan sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan mengembangkan keadaan fisik, intelektual dan kesusilaan tertentu yang dikehendaki daripadanya oleh masyarakat politis dalam kesatuannya, juga oleh lingkungan khusus yang tertentu baginya.

Sunyoto dalam Rahardjo (1988) menyatakan bahwa pendidikan mengandung makna sebagai usaha membangun pribadi warga negara dan bangsa. Melalui pendidikan dan dengan pendidikan, kepribadian yang harmonis dipupuk dan dikembangkan. Setiap orang setahap demi setahap mengatur kehidupan dirinya, mengatasi persoalannya,

mencukupi kebutuhannya. Bahkan dengan pendidikan, setiap orang diharapkan dapat memberikan jasa-jasanya bagi orang lain, bagi masyarakat dan bangsanya, sesuai dengan keadaan dan kemampuannya.

Gazalba (1989) menyatakan bahwa pendidikan pertama dan utama warga masyarakat didapatnya dari lingkungan keluarga sebagai anggota keluarga. Dalam pendidikan rumah tanggal dimulai sosialisasi dan enkulturasi calon-calon anggota masyarakat. Pendidikan membentuk kebiasaan, kebiasaan yang telah mendarah daging membentuk tabiat yang menyatakan diri dalam adat. Kebiasaan tabiat membentuk sikap mental. Sikap mental ini akan menentukan kepribadian. Kepribadian akan melahitkan kemauan. Kemauan menggerakkan laku perbuatan sejenis dengan apa yang dididikan. Dengan demikian sikap mental, jenis kemauan dan laku perbuatan warga masyarakat dipersiapkan oleh pendidikan keluarga.

Berdasarkan pendapat di atas, keluarga sebagai institusi sosial, bukan hanya sebagai sebuah kelompok, tetapi lebih dari itu, ia berfungsi merangkai pola-pola tingkah laku yang mencerminkan identitas setempat dan juga dalam hubungannya dengan institusi luar keluarga. Dengan demikian, lingkungan keluarga merupakan media yang sesuai bagi upaya penanaman etika lingkungan, karena di dalamnya secara rutin terjadi proses sosialisasi etika dan moralitas kehidupan. Sosialisasi dan proses penyadaran dalam skala keluarga akan arti pentingnya lingkungan hidup perlu diupayakan terus, sehingga muncul kesadaran

pribadi. Pada gilirannya, kesadaran tersebut akan melahirkan rasa tanggung jawab dan pengabdian terhadap keberadaan dan kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian integral dari kehidupan umat manusia.

5. Pendapatan Per Kapita

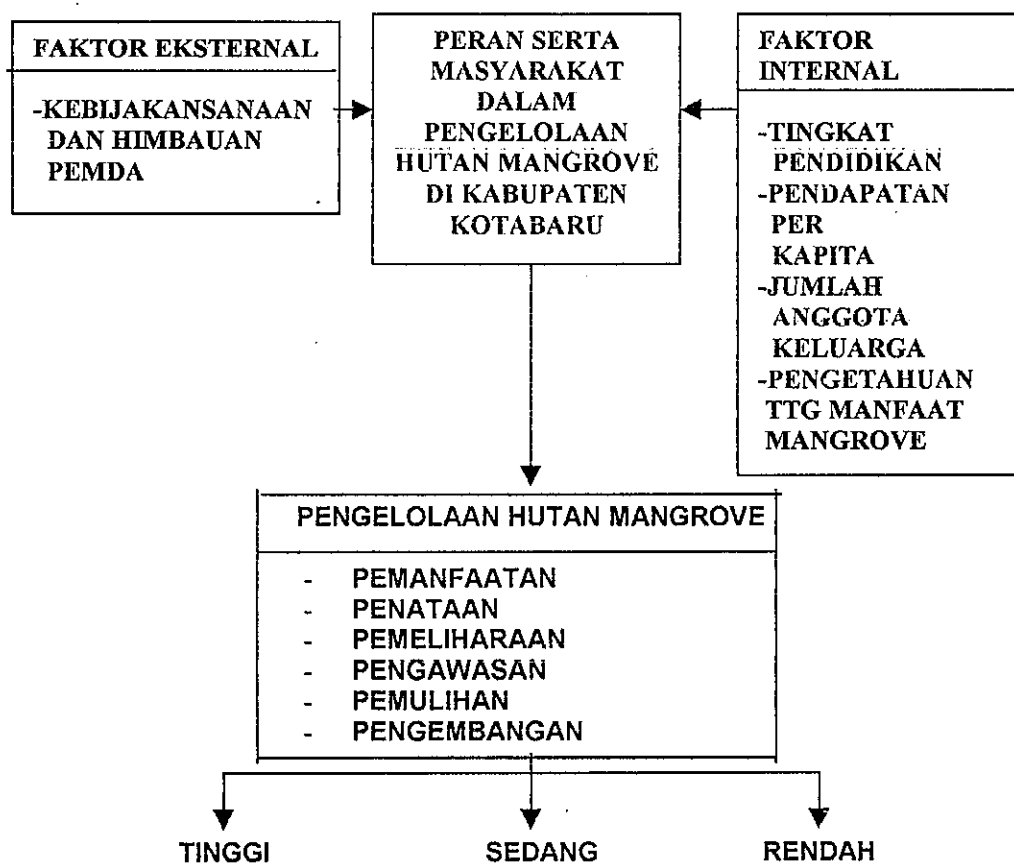
Pendapatan (income per kapita) menurut konsep Hicks (Hicksian Income) dalam Daly dan Cobb (1989) adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi selama satu minggu dan masih mengharapkan sama tingkatnya (baiknya) antara akhir minggu dengan awal minggu. Jadi, ketika baik di masa yang akan datang. Sebaliknya, jika hidup di atas rata-rata tingkat pendapatannya, maka ia merencanakan untuk lebih buruk.

Abdulrachman (1976) mengemukakan bahwa pendapatan adalah sesuatu yang dapat berupa uang atau keuntungan material lainnya yang timbul dari kekayaan atau dari jasa-jasa yang dilakukan oleh manusia secara bebas. Tingkat pendapatan (Income Level) adalah tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh seseorang atau suatu keluarga yang didasarkan atas penghasilan mereka atau sumber-sumber pendapatan lainnya.

Pendapatan seseorang atau kelompok masyarakat yang relatif tinggi, akan memungkinkan seseorang tidak hanya memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang layak. Dengan tingkat pendapatan yang relatif tinggi, masyarakat dapat membagi dan menyisihkannya untuk kebutuhan hidup yang lain termasuk di dalamnya menjaga dan memelihara kelestarian lingkungannya.

B. Landasan Teori

Masalah lingkungan hidup termasuk masalah pengelolaan hutan mangrove jelas tidak mungkin tanggung jawabnya dilimpahkan pada pihak lain karena masalah hutan mangrove merupakan hasil dari interaksi dan interdependensi seluruh aktivitas sosial budaya masyarakat dengan lingkungan hidupnya. Oleh karena itu peran serta segenap komponen warga masyarakat dalam memberikan perlindungan dan konservasi terhadap lingkungan hidup merupakan keharusan masing-masing individu warga masyarakat.



Gambar 2. Skematis hubungan antara faktor-faktor yang saling berpengaruh terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan selatan.

Berdasarkan Gambar 2 skematis di atas, jika dilihat dari frekuensi maupun jenis peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove kemungkinan besar bervariasi. Adanya variasi ini disebabkan oleh berbagai faktor dan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti tingkat pendidikan formal masyarakat, tingkat pendapatan per kapita, jumlah anggota keluarganya, pengetahuan tentang manfaat hutan mangrove sebagai faktor intern dan juga berpengaruh dari faktor ekstern seperti kebijakan, himbauan-himbauan dari pemerintah daerah.

C. Asumsi dan Hipotesis Penelitian

1. Asumsi

Untuk kelancaran penelitian ini ada tiga asumsi dasar yang perlu dipegang sebagai acuan :

1. Warga masyarakat Kecamatan Pulau Laut Utara di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan terdiri atas individu-individu yang mempunyai latar belakang kehidupan sosial ekonomi yang berbeda-beda baik pendidikan, pendapatan, pengetahuan, budaya dan pekerjaannya;
2. Warga masyarakat Kecamatan Pulau Laut Utara dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan hutan mangrove masing-masing bervariasi baik cara maupun intensitasnya.

2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan formal dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Makin tinggi tingkat pendidikan formal, makin tinggi tingkat perannya dalam pengelolaan hutan mangrove.
2. Terdapat korelasi positif antara tingkat pendapatan per kapita dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Makin tinggi tingkat pendapatan per kapita makin tinggi perannya dalam pengelolaan hutan mangrove.
3. Terdapat korelasi positif antara jumlah anggota keluarga dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Makin banyak jumlah anggota keluarga, makin tinggi perannya dalam pengelolaan hutan mangrove.
4. Terdapat korelasi positif antara pengetahuan tentang manfaat hutan mangrove dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Makin banyak informasi pengetahuan tentang manfaat hutan mangrove, makin tinggi peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove.
5. Terdapat korelasi positif antara Kebijakan dan himbuan Pemda Kabupaten Kotabaru dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Makin intensif himbuan dari Pemda maka makin tinggi peran masyarakatnya.

III. METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan suatu penelitian peneliti perlu menetapkan jenis penelitian dan metode penelitian yang berhubungan erat yang sesuai dengan prosedur, alat dan desain penelitian yang digunakan. Prosedur memberikan kepada peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian. Teknik penelitian menentukan alat-alat ukur yang diperlukan dalam penelitian, sedangkan metode penelitian memandu peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan (Nazir, 1988).

Jenis penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah penelitian survai dengan tipe explanatory. Menurut Singarimbun dan Effendi (1989), dalam penelitian survai, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner, dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Tipe explanatory untuk menjelaskan hubungan kausal (korelasi) antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa .

Penelitian survai bertujuan untuk mengadakan pengkajian terhadap fakta-fakta yang telah tersedia di lapangan tanpa mengadakan suatu perlakuan (manipulasi, treatment) apapun terhadap variabel yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan korelatif yakni bermaksud mengadakan pengujian terhadap pengaruh faktor-faktor tertentu dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di lokasi penelitian (4 desa dan 2

keluarahan) dengan kondisi mangrove yakni; kondisi mangrove yang masih utuh, hutan mangrove yang terkonversi dan hutan mangrove yang rusak)

A. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah 6.824 kepala keluarga yang tinggal di 4 desa dan 2 kelurahan yang ada di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Populasi penelitian ini adalah masyarakat pesisir Kelurahan dan desa di Kecamatan Pulau Laut Utara yang memiliki sebaran hutan mangrove.

2. Sampel dan Teknik Sampling

Besarnya jumlah sampel yang diambil dari 6.824 kepala keluarga adalah sebanyak 100 kepala keluarga. Pengambilan sampel sejumlah tersebut sudah dianggap representatif, mengingat karakteristik atau sifat sampelnya yang homogen. Persebaran sampel responden dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini dan Lampiran 1 (peta lokasi penelitian).

Sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah proporsional sampling, artinya semua anggota populasi dipilih secara proporsional untuk dijadikan sebagai sampel dengan cara pengambilan sampel berlapis (strata). Pengambilan sampel ini berdasarkan lapisan status sosial di masyarakat yang didasarkan kepada jenis pekerjaan. Jumlah sampel yang diambil per kelurahan/desa tergantung kepada besarnya jumlah populasi

untuk masing-masing kelurahan/desa sehingga jumlah sampel populasi masing-masing kelurahan/desa dalam Kecamatan Pulau Laut Utara adalah tidak sama (proporsional). Individu populasi yang ditentukan sebagai anggota sampel adalah kepala keluarga dan individu dewasa yang oleh masyarakat dianggap sebagai tokoh masyarakat dan penduduk tetap dan memiliki tempat tinggal yang tetap.

Tabel 1.
Persebaran sampel Responden per desa per kelurahan
Di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupetan Kotabaru

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah KK	Jumlah Sampel
1.	Kel. Kotabaru Hulu	1.121	16
2.	Kel. Kotabaru Hilir	554	9
3.	Ds. Stagen	529	8
4.	Ds. Semayap	2.422	35
5.	Ds. Rampa	1.251	18
6.	Ds. Hilir Muara	947	14
	Jumlah	6.824	100

Sumber : Kecamatan Pulau Laut Utara Dalam Angka (2000)

B. Jenis dan sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada masyarakat di dalam desa dan kelurahan yang telah ditetapkan sebagai sampel/responden penelitian di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.
2. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur, laporan, ketetapan dan dokumen-dokumen dari Pemda dan Pemerintah Pusat yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Cara penelitian ini menyangkut teknik pengumpulan data, dimana teknik pengumpulan data berperan penting dalam suatu penelitian. Baik buruknya hasil suatu penelitian sebagian besar dipengaruhi oleh metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data. Oleh karena itu, ketepatan dalam memilih teknik pengumpulan data merupakan syarat utama dalam meraih data yang akurat, valid dan sesuai dengan tujuan penelitian (Singarimbun,dkk, 1989).

Pengumpulan data dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap pra survai dan tahap kedua adalah tahap survai pengambilan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya sebagai berikut : data lapangan (data primer) dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner terbuka dan tertutup.

D. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul dalam tahap pengumpulan data perlu diolah dahulu. Dalam tahap pengolahan data ini, kegiatan yang akan dilakukan, yakni sebagai berikut:

a. Editing (Penyuntingan)

Kegiatan yang dilakukan dalam editing ini adalah memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden. Beberapa hal yang akan diperhatikan dalam pemeriksaan ini, yaitu; (a) kesesuaian

jawaban responden dengan pertanyaan yang diajukan, (b) kelengkapan pengisian daftar pertanyaan dan (c) konsistensi jawaban responden.

b. Coding (Pengkodean)

Setelah editing diselesaikan, kegiatan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pemberian kode (pengkodean) pada jawaban responden yang diterima. Tujuan pengkodean ini adalah untuk menyederhanakan jawaban responden.

c. Tabulating (Tabulasi)

Kegiatan yang dilakukan dalam tabulating (tabulasi) adalah menyusun dan menghitung data hasil pengkodean, untuk kemudian disajikan dalam bentuk tabel.

d. Proses pengolahan data komputer

Untuk mengolah data primer yang sudah valid dilakukan melalui proses komputer.

E. Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka analisis data didahului dengan membuat kategori. Kategori jawaban responden dilakukan dengan memberi nilai atau skor terhadap item pertanyaan yang diajukan tentang, pengetahuan responden terhadap mangrove, kebijakan dan himbauan pemda peran serta masyarakat dalam pengelolaan mangrove. Skor tersebut bervariasi tergantung pada banyaknya alternatif jawaban pada

setiap pertanyaan kemudian diklasifikasi dengan menggunakan tingkat pengukuran interval. Lebar Interval (I) diperoleh dengan membagi jarak pengukuran kumulatif (R) dengan jumlah kategori, yang apabila disederhanakan dengan rumus sebagai berikut berikut :

$$I = \frac{R}{\text{Jumlah kategori}} \quad (1)$$

Keterangan:

I = Lebar interval

R = Nilai kumulatif tertinggi – nilai kumulatif terendah

Kategori berjumlah 3 sebagai berikut:

1. Rendah
2. Sedang
3. Tinggi

Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan analisis tabel dan analisis statistik. Analisis tabel didasarkan kepada tabel frekuensi dan teknik analisis statistik yang digunakan adalah analisis uji beda dengan dua rata-rata "T" test, analisis korelasi sederhana (r), analisis varian, analisis regresi berganda. Masing-masing analisis statistik di atas menggunakan taraf nyata 99%. Analisis data ini menggunakan peralatan bantu komputer dengan program statistik SPSS Versi 10 (Santoso, 2002).

F. Definisi Operasional dan Pengukuran

Definisi operasional dan pengukuran untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Definisi Operasional

- a. Tingkat pendidikan formal adalah sesuatu yang terjadi dimasyarakat dan merupakan proses atau cara seseorang memperoleh atau menghasilkan kemampuan fisik, moral dan sosial yang dituntutnya dan dipandang sebagai tahap yang pasti dalam kehidupan yang dimulai pada umur lima tahun, lalu berlanjut ke sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah lanjutan, kemudian mungkin pendidikan tinggi.
- b. Tingkat pendapatan per kapita
Tingkat pendapatan per kapita adalah suatu pendapatan yang rasional berupa uang yang didapatkan dari jasa yang dilakukan oleh masyarakat dalam masa atau periode waktu tertentu. Indikatornya pendapatannya dapat berupa gaji per bulan kepala dalam atau jenis penghasilan lainnya dari suatu usaha atau pekerjaan masyarakat dalam jumlah rupiah.
- c. Jumlah anggota keluarga adalah jumlah keseluruhan anggota keluarga yang mendiami suatu rumah tangga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya yang masih tinggal di dalamnya atau belum hidup berumah tangga.
- d. Pengetahuan tentang manfaat hutan mangrove adalah pengetahuan yang dimiliki oleh individu tentang manfaat hutan mangrove

- e. Kebijakan dan himbauan dari Pemda adalah ajakan secara persuasif, perintah atau paksaan dengan UU atau Perda untuk melaksanakan segala kegiatan pelestarian hutan mangrove di Kabupaten Kotabaru dalam rangka pemberian motivasi atau dorongan moral untuk kegiatan dalam rangka pembinaan dan penyadaran; Penyuluhan dan motivasi dari tokoh masyarakat, rehabilitasi lahan mangrove, tindakan hukum dan melakukan pengawasan kelestarian hutan mangrove
- f. Peran serta masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan secara fisik dan mental atau emosi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) dalam dinamika dan proses pembangunan yang mendorong dirinya untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi pencapaian tujuan pembangunan dalam bentuk pembagian tugas dan tanggung jawab atau peran kemasyarakatan.
- g. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (UU No. 23 Tahun 1997).

3. Pengukuran

Penentuan kisaran nilai dari kuisioner yang disusun dilakukan dengan menggunakan pengukuran skala Likert, untuk mengukur perilaku peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 1999).

BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

1. Letak Wilayah

Kotabaru, adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang terluas meliputi sebagian daratan dari Propinsi Kalimantan Selatan, pulau-pulau dan laut dengan ibukotanya di bagian utara Pulau Laut. Kabupaten Kotabaru terletak di bagian timur dari wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, terletak pada koordinat $2^{\circ}20'$ - $4^{\circ}20'$ LS dan $115^{\circ}15'$ - $116^{\circ}30'$ BT (Anonim, 1997) dan mempunyai luas wilayah 14.489,69 Km² terbagi atas 20 kecamatan dan 309 desa. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pulau Laut Utara, merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kotabaru yang sangat pesat perkembangannya dibandingkan dengan kecamatan lainnya dengan mengambil lokasi sampel penelitian yakni di Kelurahan Kotabaru Hulu, Kelurahan Kotabaru Hilir, Desa Stagen, Desa Semayap, Desa Rampa dan Desa Hilir Muara. Luas kelurahan/desa dan persentasi luas Kecamatan Pulau Laut Utara dapat dilihat pada Tabel 2.

Sarana perhubungan untuk mencapai daerah penelitian, dapat ditempuh dengan roda empat dari Banjarmasin mencapai pelabuhan Batulicin selama 6 jam, penyeberangan ke Tanjung Serdang selama 30 menit kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kotabaru menempuh waktu 60 menit perjalanan melalui jalan beraspal. Menggunakan angkutan udara dapat ditempuh dari Bandara Syamsudinoor Banjarmasin

menuju bandara Stagen Kotabaru, kemudian menempuh perjalanan dengan kendaraan roda empat.

Tabel 2.
Luas Kelurahan/Desa dan Persentasi Luas
Kecamatan Pulau Laut Utara Tahun 2000

No.	Desa / Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Sungai Pasir	11.601	23.42
2.	Maniang	7.663	5.78
3.	Mekarpura	3.398	6.86
4.	Selaru	3.315	6.69
5.	Sungup Kanan	4.758	9.61
6.	Pantai Baru	2.865	5.78
7.	Megasari	2.865	5.78
8.	Sebelimbingan	2.150	4.34
9.	Gunung Sari	1.618	3.27
10.	Stagen	1.808	3.65
11.	Gunung Ulin	1.868	3.77
12.	Sungai Taib	398	0.79
13.	Semayap	785	1.58
14.	Dirgahayu	688	1.39
15.	Baharu Selatan	398	0.80
16.	Sebatung	18	0.04
17.	Kotabaru Hulu	23	0.05
18.	Rampa	23	0.05
19.	Kotabaru Tengah	20	0.04
20.	Kotabaru Hilir	65	0.12
21.	Hilir Muara	50	0.10
22.	Batuah	78	0.16
23.	Baharu Utara	160	0.32
24.	Sigam	465	0.94
25.	Tirawan	670	1.35
26.	Sarang Tiung	645	1.30
27.	Gedambaan	1.140	2.30
	Kecamatan Pulau Laut Utara	49.530	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Kotabaru (2000)

2. Batas Adiministrasi

Wilayah Kecamatan Pulau laut Utara berbatasan dengan daerah sekitarnya sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Laut
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau Laut Timur
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau Laut Barat
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Laut.

Berdasarkan administrasi pemerintahan, Kecamatan Pulau Laut Utara terdiri dari 27 desa/kelurahan dengan luas wilayah 49.530 Ha. Kondisi fisiografis wilayah Kabupaten Kotabaru cukup beragam. Wilayah antara pegunungan dan daerah pantai merupakan daerah bergelombang, daerah pantai merupakan daerah yang cukup datar. Sebagian besar wilayah pesisirnya terdapat hutan mangrove dan hutan rawa. Wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara berada pada ketinggian 0 – 700 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan pengolahan data dari Peta Topografi, penyebaran titik-titik ketinggian Kecamatan Pulau laut Utara dibagi menjadi tujuh kelas yaitu, 0 – 7 meter dpl, 7 – 25 meter dpl, 25 – 100 meter dpl, 100 – 200 meter dpl, 200 – 400 meter dpl, > 400 meter dpl.

Tabel 3 dan 4, dapat dilihat luas Kabupaten Kotabaru berdasarkan kelas ketinggian dan kelas lereng. Kondisi fisiografis Kecamatan Pulau Laut Utara cukup beragam. Dari daerah pantai di sebelah timur merupakan daerah yang cukup datar, semakin ke arah barat wilayahnya semakin bergelombang sampai berbukit. Jenis tanah yang luas adalah podsolik

merah kuning yang mencapai 42.905 Ha (86,62 %), jenis tanah yang paling sedikit adalah lotosol yang luasnya 6625 Ha (13,38%).

Tabel 3
Luas (Ha) kelas ketinggian di Kecamatan Pulau Laut Utara
Kabupaten Kotabaru

No.	Desa/Kelurahan	Kelas ketinggian (m)						Jum.(Ha)
		0-7	7.-25	25-100	100-200	200-400	>400	
1	Kotabaru Hilir	25	0	35	5	0	0	65
2	Sigam	165	0	300	0	0	0	465
3	Sungaitaib	100	0	293	0	0	0	393
4	Gunung Ulin	0	0	597	330	625	315	1868
5	Baharu Selatan	0	0	163	145	60	30	398
6	Megasari	850	0	1423	137	377	0	2865
7	Maniang	208	0	7317	137	0	0	7663
8	KotabaruTengah	20	0	0	0	0	0	20
9	Batuah	0	0	78	0	0	0	78
10	Baharu Utara	0	0	147	12	0	0	160
11	Kotabaru Hulu	0	0	23	0	0	0	23
12	R a m p a	23	0	0	0	0	0	23
13	Sarangtiung	125	0	375	117	27	0	645
14	Gedambaan	162	0	292	237	332	115	1140
15	Pantaibaru	385	0	1562	320	407	190	2865
16	S t a g e n	870	0	938	0	0	0	1808
17	Gunungsari	0	0	720	252	645	0	1618
18	Sebelimbingan	700	0	920	127	402	7	2150
19	Sungaipasir	275	0	9286	257	1775	0	11601
20	Sebatung	18	0	0	0	0	0	18
21	Hilirmuara	25	0	17	7	0	0	50
22	Tirawan	0	0	567	25	77	0	670
23	Semayap	125	0	487	107	65	0	785
24	Dirgahayu	12	0	133	82	240	240	688
25	Sungupkanan	775	0	3785	137	60	0	4758
26	Selaru	435	0	2880	0	0	0	3315
27	Mekarpura	337	0	3060	0	0	0	3398
	J u m l a h	5637	0	35403	2440	5094	955	49530
	Persentasi (%)	11,38	0	71,48	4,93	10,29	1,93	100,00

Sumber: Data Pokok Pembangunan Kecamatan Kabupaten Kotabaru

Tabel 4
Luas (Ha) kelas lereng di Kecamatan Pulau Laut Utara
Kabupaten Kotabaru

No.	Desa/Kelurahan	Kelas Lereng (%)					Jum.(Ha)
		0-2	2.-15	15-25	25-40	>40	
1	Kotabaru Hilir	25	40	0	0	0	65
2	Sigam	317	148	0	0	0	465
3	Sungaitaib	100	275	18	0	0	393
4	Gunung Ulin	0	130	417	716	604	1868
5	Baharu Selatan	0	54	96	125	123	1868
6	Megasari	1037	950	137	412	328	398
7	Maniang	237	6429	75	921	0	2865
8	KotabaruTengah	20	0	0	0	0	7663
9	Batuah	0	78	0	0	0	20
10	Baharu Utara	0	110	50	0	0	160
11	Kotabaru Hulu	12	10	0	0	0	23
12	R a m p a	23	0	0	0	0	23
13	Sarangtiung	0	133	162	0	350	645
14	Gedambaan	202	50	175	547	166	1140
15	Pantaibaru	575	927	375	475	512	2865
16	S t a g e n	975	833	0	0	0	1808
17	Gunungsari	0	1023	357	237	0	1618
18	Sebelimbangan	700	721	212	187	329	2150
19	Sungaipasir	0	10571	450	417	162	11601
20	Sebatung	0	18	0	0	0	18
21	Hilirmuara	25	25	0	0	0	50
22	Tirawan	0	569	101	0	0	670
23	Semayap	125	412	85	162	0	785
24	Dirgahayu	37	88	65	135	362	688
25	Sungupkanan	1237	3258	100	162	0	4758
26	Selaru	662	2652	0	0	0	3315
27	Mekarpura	500	2898	0	0	0	3398
	J u m l a h	6812	32406	2875	4500	2937	49530
	Persentasi (%)	13,75	65,43	5,8	9,09	5,93	100,00

Sumber: Data Pokok Pembangunan Kecamatan Pulau Laut Utara (1997)

3. Iklim

Iklim di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dipengaruhi oleh dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan dengan suhu udara rata-rata 30,5°C – 32,9°C dan intensitas penyinaran matahari rata-rata 33 – 84% dan juga dipengaruhi musim hujan dengan suhu udara

minimum rata-rata antara 22,7°C – 24,7°C dan kelembaban nisbi rata-rata 78 – 88%.

Intensitas penyinaran matahari yang tinggi menyebabkan tingginya intensitas penguapan sehingga selalu terdapat awan aktif dan udara yang penuh sehingga menyebabkan seringkali turun hujan. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, Kecamatan Pulau Laut Utara dan Kabupaten Kotabaru pada umumnya memiliki hari hujan rata-rata berkisar antara 1 – 14 dengan jumlah hari hujan berkisar antara 5 – 28 hari/tahun. Hujan terbanyak jatuh pada bulan Nopember sampai dengan april. Bulan-bulan kering jatuh pada bulan Mei sampai dengan Oktober.

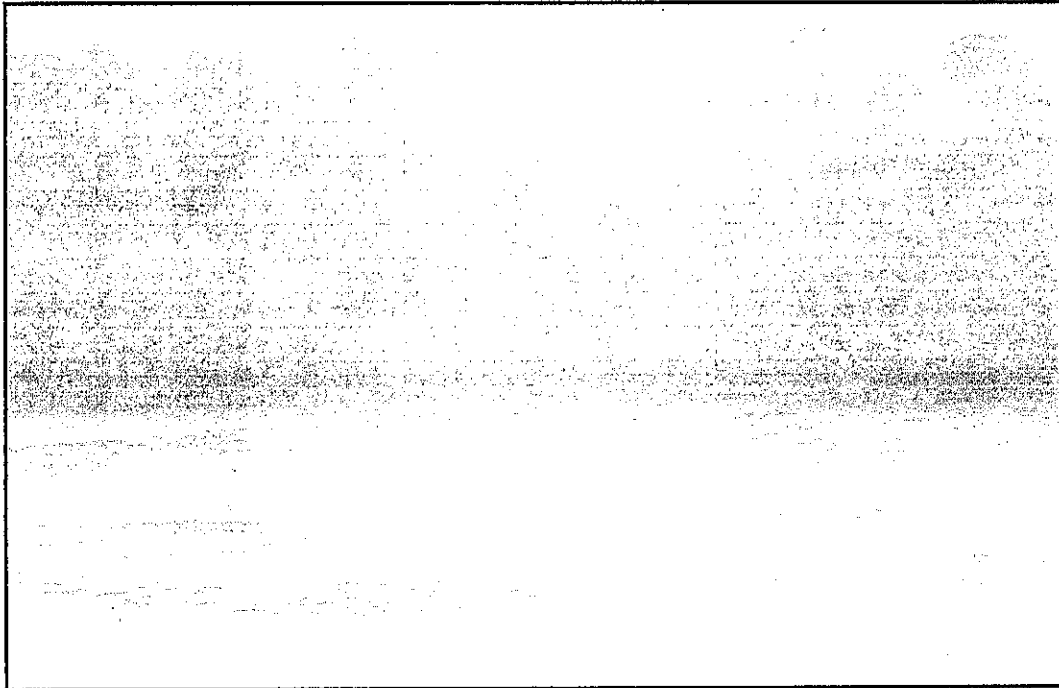
4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru tahun 2000 berdasarkan Sensus penduduk tahun 2000 berjumlah 410.361 jiwa, kepadatan penduduk kurang lebih 28 jiwa/Km² dengan distribusi kepadatan yang tidak merata. Adapun jumlah dan kepadatan penduduk di Kecamatan Pulau laut Utara adalah sejumlah 70.323 jiwa dengan kepadatan 142,25 jiwa/Km².

5. Gambaran Umum Hutan Mangrove

Hampan luasan hutan mangrove di Kabupaten Kotabaru banyak terdapat di wilayah Selat Laut yakni membentang dari arah utara sampai

ke selatan (Gambar 3) yakni masuk pada daerah Kecamatan Pulau Utara.



Gambar 3. Sebagian Kondisi hutan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Utara yang masih baik (2002)

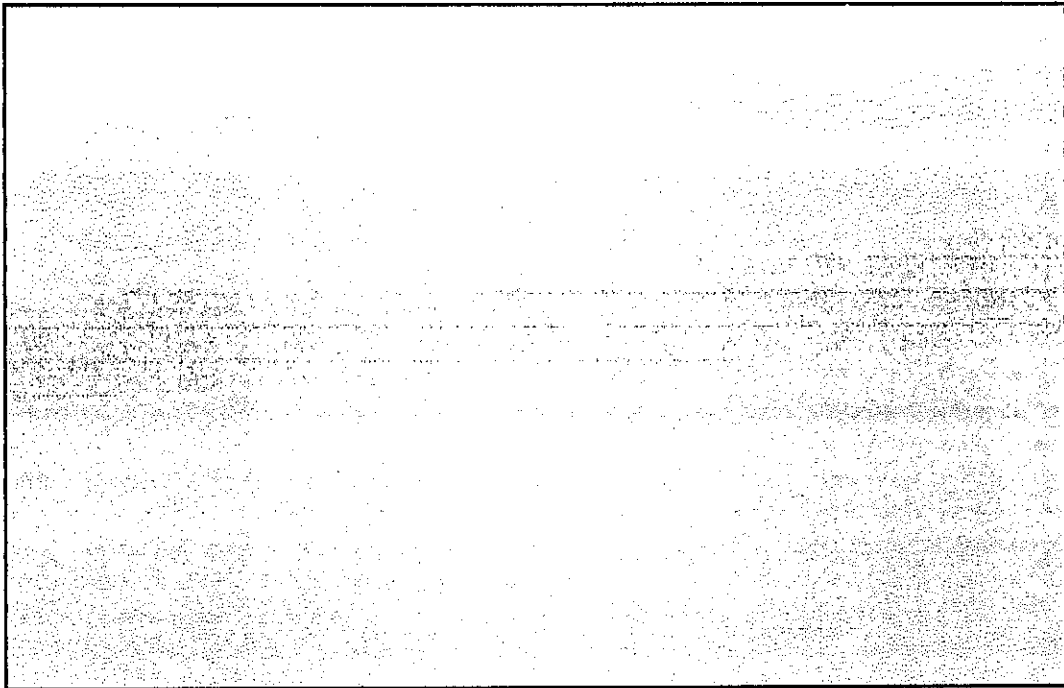
Berdasarkan hasil analisis Citra Landsat tahun 1998 dan pengamatan lapangan, hingga saat ini belum ada peta vegetasi mangrove yang dipublikasikan. Informasi vegetasi mangrove diperoleh dari hasil analisis citra landsat, dimana luas hutan mangrove yang terdapat Di Kabupaten Kotabaru adalah 112.963 Ha. Berdasarkan data pokok Kabupaten Kotabaru tahun 1997 luas hutan mangrove di wilayah Kabupaten Kotabaru adalah 123.069 Ha atau berkisar 8,49% luas total Kabupaten Kotabaru tersebar di 14 kecamatan, dengan demikian kondisi hutan mangrove di Kabupaten Kotabaru khususnya di Kecamatan Pulau laut Utara dari tahun ke tahun mengalami penurunan baik dari segi luasan

maupun konopinya. Luas hutan mangrove di Kecamatan Pulau laut Utara tahun 1998 adalah sebesar 685,52 Ha. Dari luasan tersebut, sampai akhir tahun 2000 teridentifikasi luas hutan mangrove berkurang sebesar lebih kurang 35% atau seluas 239,94 Ha. Dengan demikian kondisi hutan mangrove dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat tinggi baik dari segi luasan maupun kanopinya.

Kondisi hutan mangrove Di Kecamatan Pulau laut Utara secara umum kondisinya di katagorikan cukup mengawatirkan. Apabila dilihat secara khusus di lokasi penelitian, hutan mangrove di Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru dikatagorikan dalam tiga katagori meliputi:

- Hutan mangrove utuh (baik)
- Hutan mangrove dikonversi
- Hutan mangrove yang mengalami kerusakan

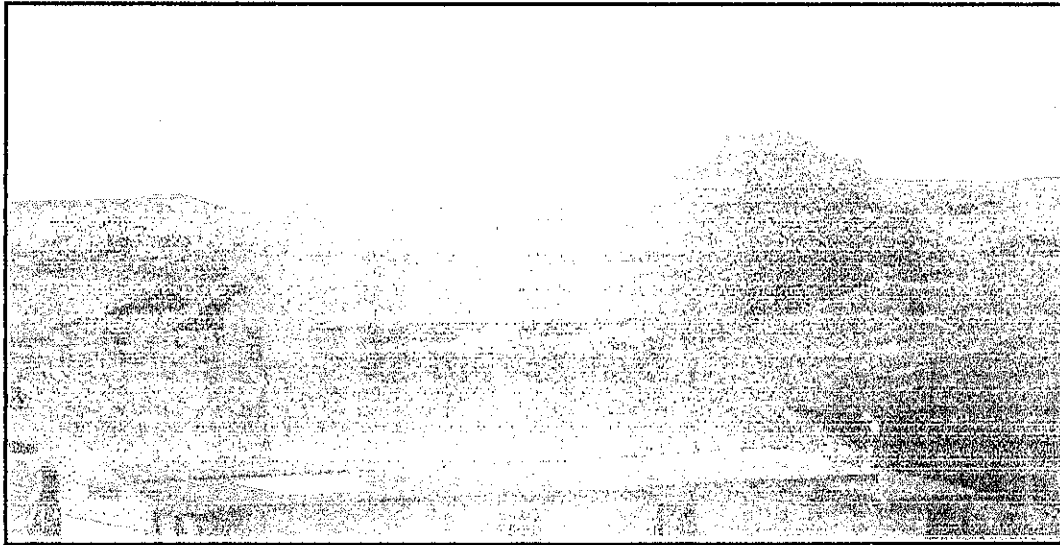
Hutan mangrove yang masih utuh (baik) terdapat dibebberapa lokasi yaitu pada Pulau Anak Burung (masyarakat menyebutnya dengan Pulau Hantu) , dan hutan ini sangat jarang dimasuki oleh masyarakat. Di lokasi hutan mangrove ini masih diketemukan pula beberapa ekor Bekantan (*Nasalis larvaus*) dengan kondisi yang baik. Lokasi lainnya terdapat di Pulau Tampakan, kondisi hutan mangrove juga masih baik, walaupun dijumpai bekas penebangan sekitar 10 pohon tetapi secara keseluruhan kondisi hutannya masih baik. (Gambar 4).



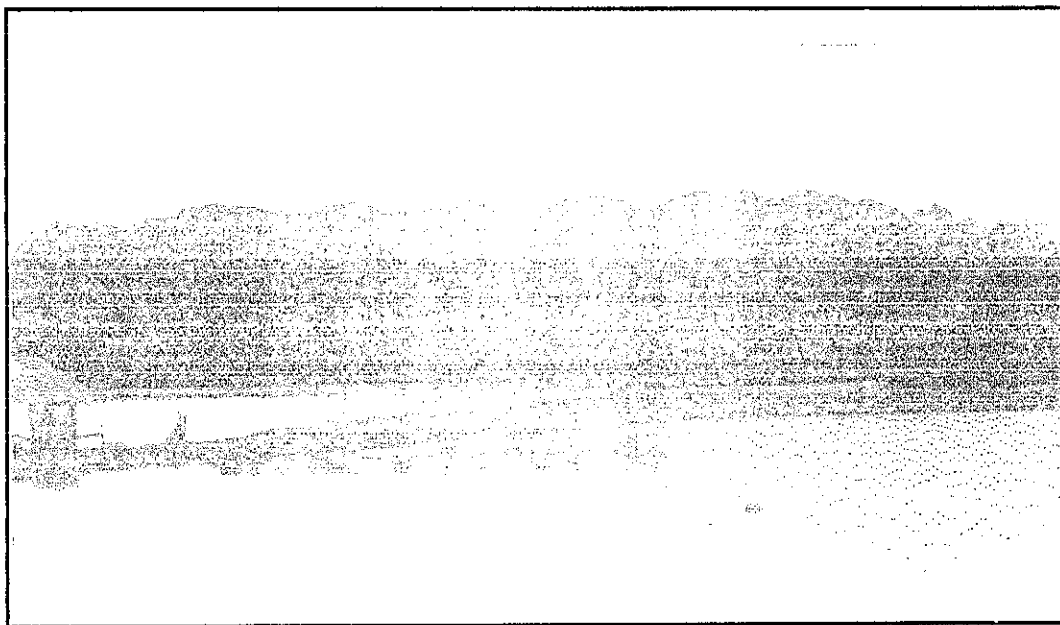
Gambar 4. Hamparan mangrove di pesisir Selat Laut dengan kondisi masih baik/utuh terdapat pada Desa Stagen dan Desa Semayap (2002)

Hutan mangrove yang dikonversi ditemukan di beberapa lokasi, dan bila ditinjau dari aspek hukum, pengkonversian dilakukan secara legal. Pengkonversian secara legal merupakan bagian kegiatan pengkonversian hutan mangrove berdasarkan landasan hukum yang berlaku dan disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pengkonversian kawasan hutan mangrove secara legal dijumpai dalam bentuk bangunan pelabuhan laut, pembangunan pabrik kayu lapis, pabrik semen, pelabuhan terminal batu bara. Pengkonversian secara ilegal merupakan kegiatan pengkonversian hutan mangrove dengan tanpa dilandasi aturan hukum yang berlaku dan tanpa disepakati oleh pihak yang berkepentingan. Pengkonversian terjadi dalam pembuatan bangunan rumah atau tempat tinggal nelayan dan masyarakat lainnya di sekitar pantai yang berhutan

mangrove. Disamping itu juga terjadi dalam bentuk pembuatan tambak oleh masyarakat di area hutan mangrove lebih kurang 150 Ha (Gambar 5).



Gambar. 5 Konversi hutan mangrove menjadi pemukiman masyarakat ditemui di Desa Hilir Muara, Desa Rampa dan Kelurahan Kotabaru Hulu dan Kelurahan Kotabaru Hilir (2002)

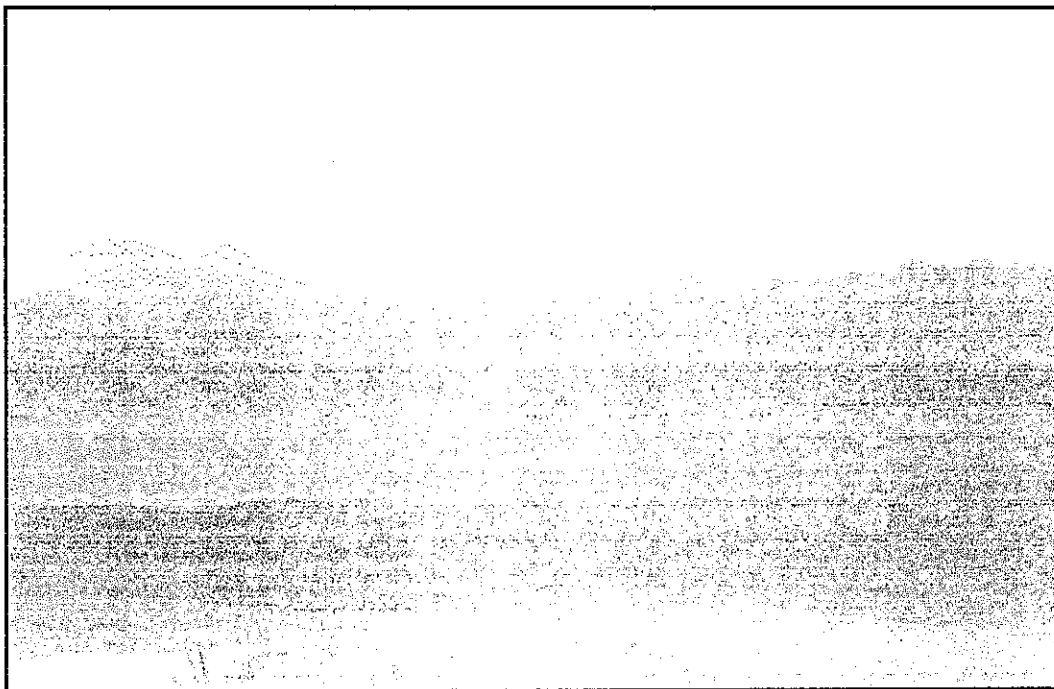


Gambar 6. Konversi hutan mangrove menjadi areal pertambakan Ditemui di Desa Stagen dan Desa Kotabaru Hulu (2002)

Apabila ditinjau dari caranya atau keadaan fisik di lapangan, pengkonversian dilakukan dengan cara dua cara :

1. Membabat seluruh/sebagian hutan mangrove sehingga lahan bekas mangrove terbuka dan langsung berhadapan dengan laut.
2. Membabat sebagian hutan dan menyisakan hutan mangrove yang terletak antara lahan bekas dibabat dan laut, hutan dan laut, hutan sisaan ini berfungsi sebagai koridor atau pembata tambak dengan laut

Hutan mangrove rusak juga banyak dijumpai di tepi Selat Laut. Hutan mangrove ditebang kemudian lahannya dibiarkan saja atau tidak dimanfaatkan (Gambar 7).



Gambar 7. Hutan mangrove rusak dan lahannya dibiarkan saja
Banyak ditemukan di Desa Stagen dan Desa Hilir Muara
(2002)

Kegiatan lain terhadap kawasan hutan mangrove di Kecamatan Pulau laut Utara lainnya adalah penebangan-penebangan oleh masyarakat dan lain-lain untuk kepentingan bahan dasar bangunan dan kayu bakar.

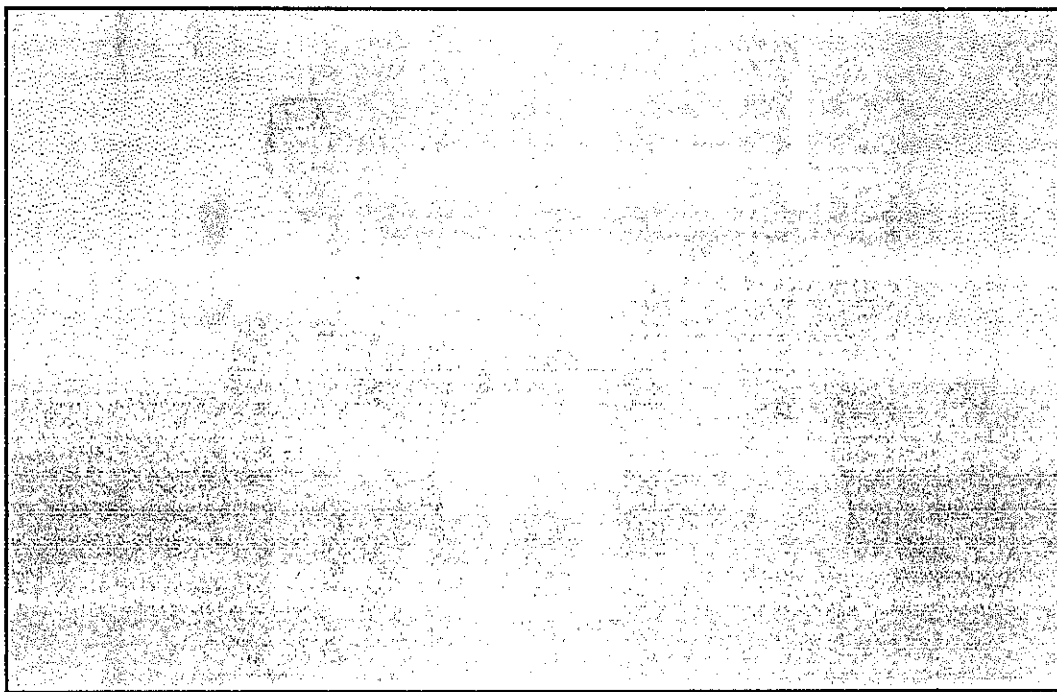
Hutan mangrove di kecamatan Pulau Laut Utara berpeluang dicemari bahan pencemar yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan disekitar hutan. Sumber-sumber pencemar yang ada adalah aktivitas pelabuhan (bocoran oli atau ceceran bahan bakar dari kendaraan air, seperti speedboat, kapal motor), perusahaan-perusahaan yang berdiri di tepi laut (pabrik kayu lapis, pabrik semen), aktivitas darat yang membuang limbah ke sungai yang mengalir ke kawasan mangrove.

Adapun jenis-jenis hutan mangrove yang banyak dijumpai di Kecamatan Pulau Laut Utara adalah jenis *Rhizophora sp*, *Bruguera sp* dan *Vecenia sp*.

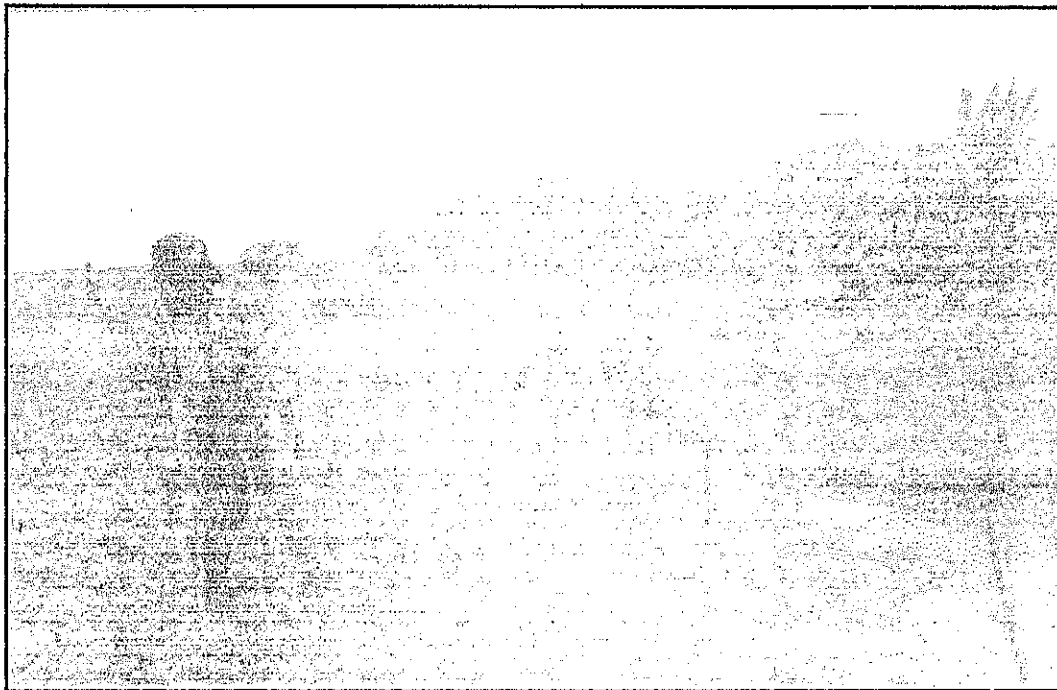
Di Kecamatan Pulau Laut Utara Jenis *Avecinia sp* dijumpai pada areal pertambakan, sepanjang tanggul dan umumnya berupa semak, tumbuh rendah dan bercabang, tumbuh pada tanah berlumpur agak lembek dengan kadar garam tinggi. Sebagian besar tumbuh berhadapan langsung dengan pantai di Selat Laut. Sedangkan di luar areal pertambakan jenis ini dapat tumbuh baik dengan ketinggian 10 – 20 meter. Jenis *Rhizophora sp* ditemukan pada berbagai tempat areal pasang surut yang tidak berbatasan langsung dengan pantai sedangkan jenis *Brugurea sp* banyak dijumpai pada tempat-tempat berlumpur agak

keras dengan frekuensi air pasang cukup tinggi dan daerah pantai berpasir, umumnya mempunyai ketinggian pohon antara 15 – 20 meter.

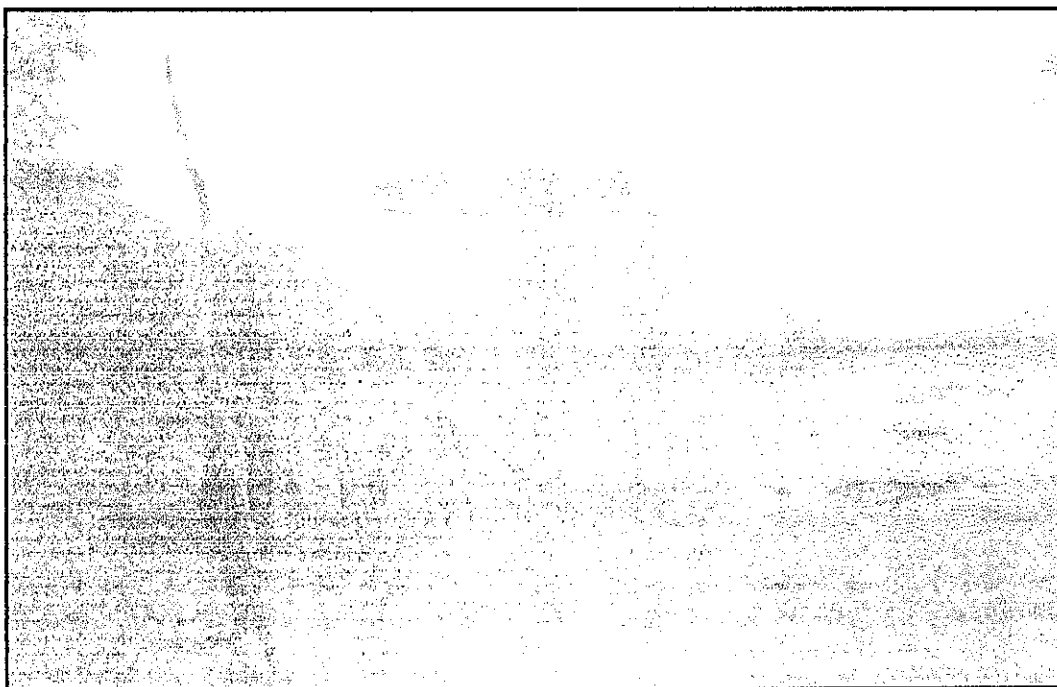
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Untuk mengurangi dan menjaga kelestarian hutan mangrove di Kecamatan Pulau laut Utara telah dilakukan, yakni melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan tentang hutan mangrove dan kelestarian sumberdaya pantai serta melakukan upaya rehabilitasi kawasan mangrove dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan penanaman mangrove (Gambar8, 9 dan 10).



Gambar 8. Peran Serta Masyarakat dalam kegiatan penyuluhan Pelestarian hutan mangrove di Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (2000)



Gambar 9. Peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan Mangrove/penanaman di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (2002)



Gambar 10. Peran serta masyarakat dalam kegiatan penanaman Hutan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (2002)

Pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove melalui kegiatan penanaman tanaman bakau (Gambar 9 dan 10), yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan bersama-sama dengan masyarakat akan terus digalakan dan dikembangkan guna terciptanya pelestarian hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Kotabaru.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin Responden

Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin di daerah penelitian menunjukkan bahwa, terdapat 91 responden (91,00%) adalah laki-laki sisanya sebanyak 9 responden (9,00%) adalah perempuan. Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5.
Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	J u m l a h (Responden)	Persentase (%)
1.	Laki – Laki	91	91,00
2.	Perempuan	9	9,00
	J u m l a h	100	100,00

Sumber : Data Primer (2002)

Dari Tabel 5 di atas terlihat bahwa sebanyak 91 responden atau 91,00 % merupakan responden laki-laki dan 9 KK atau 9,00 % responden perempuan. Mengenai status perkawinan dari responden, diketahui bahwa sebanyak 91 responden (91,00%) responden menyatakan bahwa mereka menyatakan berstatus kawin sedangkan sisanya yaitu sebanyak 9 responden menyatakan bahwa mereka janda (suami meninggal).

2. Umur Responden

Komposisi responden berdasarkan i tingkatan umur didominasi oleh kelompok umur 31 tahun sampai dengan 40 tahun yakni sebesar 44 rresponden yang terdiri dari PNS/ABRI sebanyak 5 responden, pedagang 3 responden, bidang Jasa 6 responden, buruh industri dan bangunan sebanyak 12 responden dan nelayan sebanyak 18 responden. Kelompok umur 41 – 50 tahun sebanyak 32 responden, yakni PNS/ABRI sebanyak 12 responden, pedagang 4 responden, bidang jasa 1 responden, buruh industri dan bangunan 5 responden dan nelayan sebanyak 10 responden. Kelompok umur 51 – 60 tahun sebanyak 14 responden yang terdiri dari PNS/ABRI 1 responden, pensiunan sebanyak 5 responden, pedagang 1 responden, bidang jasa 1 responden, buruh industri dan bangunan 3 responden dan nelayan sebanyak 3 responden. Dibawah 30 tahun sebanyak 7 responden terdiri dari PNS 1 responden, buruh industri dan bangunan 3 responden dan nelayan sebanyak 3 responden. Selanjutnya sebanyak 3 responden adalah kelompok umur lebih dari 60 tahun yang teridiri dari pensiunan 2 responden dan 1 responden bekerja di bidang jasa. Tabel 6 di bawah menunjukkan komposisi umur responden di daerah penelitian.

Tabel 6.
Komposisi responden berdasarkan tingkat umur

No	Jenis Pekerjaan	Tingkat Umur (tahun)					Rata-rata	Jumlah
		< 30	31-40	41-50	51-60	>60		
1.	PNS/ABRI	5	5	12	1	-	43,11	19
2.	Pensiunan	-	-	-	5	2	58,33	7
3.	Pedagang	-	3	4	1	-	43,01	8
4.	Jasa	-	6	1	1	1	43,44	9
5.	Buruh industri/bang.	3	12	5	3	-	37,65	23
6.	Nelayan	3	18	10	3	-	39,55	34
	Jumlah	7	44	32	14	3	-	100

Sumber : Data Primer (2002)

3. Jenis Pekerjaan Responden

Jenis pekerjaan responden di daerah penelitian bervariasi, yakni terdiri dari PNS/ABRI dan pensiunan, pedagang, jasa, buruh industri/bangunan dan nelayan. Tabel 7 di bawah ini menggambarkan jenis pekerjaan responden.

Tabel 7.
Komposisi responden berdasarkan Jenis pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	PNS/ABRI	6	5	19
2.	Pensiunan	7	-	7
3.	Pedagang	8	2	8
4.	Jasa	14	1	9
5.	Buruh industri/bang.	22	1	23
6.	Nelayan	34	-	34
	Jumlah	91	9	100

Sumber : Data Primer (2002)

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa, jenis pekerjaan responden yang terbesar adalah nelayan sebanyak 34 responden (laki-laki), yakni sebagai

nelayan penangkapan ikan/udang dan lainnya di laut. Kemudian pekerjaan sebagai buruh industri dan bangunan 23 responden (22 laki-laki dan 1 perempuan), baik sebagai buruh industri pabrik kayu lapis, buruh tambang, buruh perikanan dan pertukangan bangunan. PNS/ABRI sebanyak 19 responden (14 laki-laki dan 5 perempuan) yang berasal dari pegawai pemerintah daerah dan TNI. Bidang jasa sebanyak 9 responden (8 laki-laki dan 1 perempuan) dalam bidang jasa/usaha transportasi darat dan laut serta jasa pengolahan makanan. Pekerjaan sebagai pedagang sebanyak 8 responden (6 laki-laki dan 2 perempuan) yakni berbagai macam usaha dagang dan sisanya sebanyak 7 responden (laki-laki) adalah pensiunan pegawai negeri baik yang berasal dari guru maupun berasal dari pegawai pemerintah daerah lainnya.

4. Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga

Faktor pendidikan seseorang ikut memberikan kontribusi cukup besar terhadap arah dan gerak perilaku seseorang dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan alam sekitarnya. Tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktor penghambat bagi seseorang untuk berperan serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Oleh karena itu faktor tingkat pendidikan masyarakat perlu mendapat perhatian dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, sehingga orientasi melibatkan masyarakat dapat berjalan secara wajar, manusiawi dan tidak terkesan semu. Tingkat pendidikan Responden di daerah penelitian dapat dilihat dalam tabel 8 di bawah.

Tabel 8.
Komposisi Responden Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pekerjaan	Tingkat Pendidikan (sederajat)				Jumlah
		SD	SLTP	SMTA	PT/Dipl.	
1.	PNS/ABRI	-	-	9	10	19
2.	Pensiunan	-	-	5	2	7
3.	Pedagang	-	1	2	5	8
4.	Jasa	-	1	6	2	9
5.	Buruh industri/bang.	2	5	14	2	23
6.	Nelayan	25	6	3	-	34
	Jumlah	27	13	39	21	100

Sumber : Data Primer (2002)

Tabel 8 tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden terbanyak berturut-turut adalah SMTA atau sederajat sebanyak 39 responden yang terdiri dari PNS/ABRI sebanyak 9 responden, pensiunan 5 responden, pedagang sebanyak 2 responden, bidang jasa sebanyak 6 responden, buruh industri/bangunan sebanyak 14 responden dan nelayan sebanyak 3 responden. SD atau sederajat sebanyak 27 responden terdiri dari responden jenis pekerjaan sebagai buruh sebanyak 2 responden dan 34 responden lainnya adalah sebagai nelayan. Perguruan Tinggi/Diploma atau sederajat sebanyak 21 responden yakni PNS/ABRI sebanyak 10 responden, pensiunan 2 responden, pedagang sebanyak 5 responden, bidang jasa 2 responden, buruh industri ada 2 responden. Tingkat pendidikan SLTP atau sederajat sebanyak 13 responden, masing-masing hanya terdapat pada pedagang 1 responden, bidang jasa 1 responden, buruh industri dan bangunan sebanyak 5 responden dan nelayan sebanyak 6 responden.

Berdasarkan Tabel 8 di atas sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan, yakni PT/Diploma sederajat sebanyak 21 responden terdapat di desa Stagen sebanyak 2 responden, Desa Semayap 12 responden, Kelurahan Kotabaru Hulu sebanyak 3 responden, Desa Rampa 1 responden, Kelurahan Kotabaru Hilir 2 responden dan 1 responden terdapat di Desa Hilir Muara.

Kemudian tingkat pendidikan SMTA/sederajat sebanyak 39 responden terdapat 13 responden di Desa Semayap, Desa Rampa sebanyak 10 responden, Kelurahan Kotabaru Hulu sebanyak 5 responden, Kelurahan Kotabaru Hilir 3 responden, Desa Hilir Muara sebanyak 7 responden dan sisanya 1 responden terdapat di Desa Stagen. Tingkat pendidikan SMTP/sederajat sebanyak 13 responden yakni terdapat di Desa Stagen 2 responden, Desa Semayap 4 responden, Kelurahan Kotabaru Hulu 2 responden.

Desa Rampa 2 responden, Kelurahan Kotabaru Hilir 1 responden dan Desa Hilir Muara sebanyak 2 responden. Kemudian tingkat pendidikan SD/sederajat yakni sebanyak 27 responden, terdapat pada Desa Stagen sebanyak 3 responden, Desa Semayap 6 responden, Kelurahan Kotabaru Hulu 6 responden, Desa Rampa 5 responden, Kelurahan Kotabaru Hilir 3 responden dan sisanya sebanyak 4 responden terdapat di Desa Hilir Muara.

5. Tingkat Pendapatan Perkapita Responden

Tingkat pendapatan per kapita merupakan salah satu parameter kesejahteraan masyarakat. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat dapat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya dana yang dapat dikontribusikan kepada bentuk-bentuk partisipasi pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan hutan mangrove. Tabel 9 di bawah menunjukkan komposisi responden berdasarkan tingkat pendapatan per kapita.

Tabel 9
Komposisi responden berdasarkan
Tingkat pendapatan perkapita

No	Jenis Pekerjaan	Tingkat Pendapatan perkapita					Rata-rata (Rp)	Jumlah
		1	2	3	4	5		
1.	PNS/ABRI	4	5	2	7	1	1.482.355,-	19
2.	Pensiunan	3	-	-	2	2	1.312.500,-	7
3.	Pedagang	-	3	3	2	-	1.656.250,-	8
4.	Jasa	3	5	1	-	-	1.222.222,-	9
5.	Buruh industri/bang.	18	3	1	1	-	850.00,-	23
6.	Nelayan	29	5	-	-	-	823.594,-	34
Jumlah		57	21	7	12	3		100

Sumber : Data Primer (2002)

Keterangan tingkat pendapatan:

1. < Rp 1.000.000,-
2. Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000,-
3. Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000,-
4. Rp 2.000.000 – Rp 2.500.000,-
5. > Rp 2.500.000,-

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendapatan per kapita responden bervariasi. Adapun sumber pendapatan tersebut bersumber

dari pendapatan pokok responden yakni sebagai PNS/ABRI, pensiunan, sebagai pedagang, usaha jasa, sebagai buruh industri dan bangunan serta pendapatan pokok sebagai nelayan. Disamping pendapatan pokoknya beberapa responden mendapatkan tambahan pendapatan sampingan. Secara umum pendapatan responden di daerah penelitian menunjukkan bahwa terdapat 57 responden yang berpenghasilan kurang dari Rp 1000.000,- per bulan terdiri dari PNS 4 responden, pensiunan 3 responden, bidang jasa 3 responden, buruh bangunan 18 responden dan nelayan sebanyak 29 responden. Kemudian sebanyak 21 responden berpenghasilan antara Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000,- per kapita yakni PNS/ABRI 5 responden, pedagang 3 responden, bidang jasa 5 responden, buruh sebanyak 3 responden dan nelayan ada 5 responden. Selanjutnya responden dengan pendapatan perkapita antara Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000,- yakni PNS/ABRI 2 responden, pedagang sebanyak 3 responden, bidang jasa 1 responden dan buruh 1 responden. Pendapatan perkapita Rp 2.000.000 – Rp 2.500.000,- terdapat 12 responden yakni sebagai PNS/ABRI 7 responden, pensiunan 2 responden, pedagang 2 responden dan 1 responden sebagai buruh industri. Sedangkan responden yang memiliki pendapatan perkapitan di atas Rp 2.500.000,- sebanyak 3 responden yakni 1 responden sebagai PNS dan 2 responden adalah pensiunan pegawai negeri. rata-rata responden yang berpenghasilan pada tingkatan pendapatan dibawah Rp 1.000.000,- menyatakan pendapatannya tidak mencukupi untuk

kebutuhan keluarga. Selanjutnya responden yang berpenghasilan antara Rp 1.000.000,- s/d Rp 1.500.000,- per bulan menyatakan kadang-kadang mencukupi, yang berpenghasilan antara Rp 1.500.000,- s/d Rp 2.000.000,- per bulan, dan yang berpenghasilan antara Rp 2.000.000,- s/d Rp 2.500.000,- per bulan, serta yang berpenghasilan di atas Rp 2.500.000,- per bulan yang menyatakan mencukupi sampai sangat mencukupi. Rerata tingkat pendapatan per kapita responden secara keseluruhan adalah sebesar Rp 1.120.550,-. Hal tersebut menunjukkan di lokasi penelitian responden yang berpenghasilan menengah ke bawah cukup dominan yakni sekitar 78 responden (57 + 21 responden).

6. Jumlah Anggota Keluarga Responden

Jumlah anggota keluarga responden terkait dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, besar kecilnya jumlah anggota keluarga secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap keberadaan lingkungannya. Jumlah anggota responden dalam penelitian ini berasal dari keluarga inti yakni terdiri dari bapak, ibu dan anak disamping itu juga ada jumlah keluarga yang terdiri dari komposisi keluarga inti dan keluarga batih. Tabel 10 di bawah ini menggambarkan komposisi responden berdasarkan jumlah anggota keluarga. Pada Tabel 10 tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden di daerah penelitian, kebanyakan anggota keluarganya berjumlah 3 – 4 orang per responden sebanyak 47 responden (47,00%) terbanyak terdapat di Desa Semayap dan terkecil terdapat di Desa Stagen yang terdiri dari PNS /ABRI sebanyak 8 responden, pensiunan 3 responden, pedagang 5 responden,

bidang jasa 4 responden, buruh industri dan bangunan 12 responden dan nelayan sebanyak 15 responden. Kemudian keluarga beranggotakan 5 – 6 orang per kepala keluarga sebanyak 39 responden terbanyak di Desa Semayap dan terkecil di Desa Hilir Muara. Selanjutnya 1 – 2 orang per keluarga sebanyak 12 responden terbanyak terdapat di Desa Hilir Muara dan terkecil terdapat di Desa Semayap, sisanya sebanyak 2 responden beranggotakan lebih dari 6 orang per kepala keluarga masing-masing terdapat di Desa Semayap dan Kelurahan Kotabaru Hulu, yang terdiri dari PNS 1 responden dan nelayan 1 responden. Pada lokasi penelitian khususnya masyarakat nelayan jumlah anggota keluarga yang besar memiliki kecenderungan kepala keluarga akan membangun tempat tinggal baru yang diperuntukan untuk anggota keluarganya yang sudah dewasa/berkeluarga. Biasanya konstruksi bangunan hampir 75% berasal dari kayu bakau yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.

Tabel 10.
Komposisi responden berdasarkan
Jumlah anggota keluarga

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga (orang)				Jumlah
		1 - 2.	3 - 4.	5 - 6.	> 6	
1.	PNS/ABRI	1	8	9	1	19
2.	Pensiunan	1	3	3	-	7
3.	Pedagang	-	5	3	-	8
4.	Jasa	3	4	2	-	9
5.	Buruh industri/bang.	4	12	7	-	23
6.	Nelayan	3	15	15	1	34
	J u m l a h	12	47	39	2	100

Sumber : Data Primer (2002)

7. Pengetahuan Responden

Pengatahuan responden yang didasarkan kepada pengetahuan tentang manfaat hutan mangrove sangat bervariasi yakni dari tingkat pengetahuan dengan katagori rendah, sedang sampai tinggi (Lampiran 4-L9). Katagori ini didasarkan atas pengukuran interval. Lebar interval (I) diperoleh dengan membagi jarak pengukuran komulatif (R) dengan jumlah katagori, yang apabila disederhanakan dengan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{R}{\text{Jumlah katagori}} ; \quad (2)$$

I = Lebar interval

R= Nilai komulatif tertinggi – nilai komulatif terendah

Dalam penelitian ini variabel pengetahuan responden tentang manfaat mangrove terdiri dari 2 pertanyaan. Jawaban dari item pertanyaan memiliki jenjang skor 1 – 4 dengan katagori tinggi, sedang dan rendah. Kemudian dari skor masing-masing item pertanyaan dijumlahkan atau digabungkan untuk mendapatkan ukuran gabungan atau akumulasi skor. Untuk 2 pertanyaan skor komulatifnya berkisar antara 2 – 8 . Berdasarkan rumus (2) dengan memperhatikan lebar interval (I), skor komulatif ini selanjutnya diklasifikasikan dengan dengan 3 katagori. Adapun I adalah :

$$I = \frac{6}{3} = 2$$

Dengan demikian klasifikasinya adalah;

1. Katagori rendah dengan skor 2 – 3
2. Katagori sedang dengan skor 4 – 5
3. Katagori tinggi dengan skor 6 – 8

Berdasarkan klasifikasi di atas, berikut disajikan kategorisasi pengetahuan responden tentang manfaat mangrove pada Tabel 11 dibawah ini.

Tabel 11
Komposisi pengetahuan responden
tentang pengetahuan mangrove

No	Jenis Pekerjaan	Tingkat Pengetahuan			Jumlah
		Tinggi	Sedang	Rendah	
1.	PNS/ABRI	15	4	-	19
2.	Pensiunan	6	1	-	7
3.	Pedagang	5	2	1	8
4.	Jasa	4	4	1	9
5.	Buruh industri/bang.	5	16	2	23
6.	Nelayan	1	26	7	34
	J u m l a h	36	53	11	100

Sumber : Data Primer (2002)

Berdasarkan Tabel 11 di atas terlihat bahwa tingkat pengetahuan responden tentang manfaat mangrove dalam kategori tinggi sebanyak 36 responden terdiri dari PNS/ABRI sebanyak 15 responden, pensiunan 6 responden, pedagang 5 responden, bidang jasa 4 sebanyak 4 responden buruh 5 responden dan nelayan hanya 1 responden. Selanjutnya kategori responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang mangrove dengan kategori sedang sebanyak 53 responden dan kategori rendah sebanyak 11 responden yang terdiri dari pedagang 1 responden, bekerja dibidang jasa 1 responden, buruh 2 responden dan nelayan sebanyak 7 responden.

Pengetahuan responden tentang mangrove didasarkan kepada pemahaman, manfaat, mengikuti penyuluhan/pembinaan tentang tanaman mangrove dan pendapat responden tentang perlunya penyuluhan tentang tanaman mangrove kepada masyarakat di sekitar lingkungannya.

Responden yang memahami, cukup memahami, kurang memahami dan tidak memahami berdasarkan tingkat pengetahuan tentang manfaat mangrove pada lokasi penelitian adalah; yang memahami tentang pengetahuan manfaat mangrove adalah sebanyak 4 responden, cukup memahami sebanyak 35 responden, kurang memahami sebanyak 51 responden sisanya sebanyak 10 responden yang benar-benar tidak memiliki atau tidak memahami pengetahuan tentang manfaat hutan mangrove.

8. Kebijaksanaan dan Himbauan Pemda

Karakteristik responden terhadap kebijaksanaan pengelolaan hutan mangrove baik yang berasal dari Pemerintah berupa peraturan perundang-undangan maupun yang berasal dari masyarakat yakni berupa tradisi yang berlaku di dalam masyarakat ataupun himbauan-himbauan dengan kondisinya yang bervariasi. Hal ini ini didasarkan kepada respon tingkat ketaatan dan kepatuhan dengan kategorisasi tinggi, sedang dan rendah (Lampiran 5-10). Untuk menilai respon ketaatan dan kepatuhan responden terhadap kebijaksanaan dan himbauan pemda dan aturan

tradisi di masyarakat digunakan tehnik pengukuran interval. Lebar interval (I) diperoleh dengan membagi jarak pengukuran komulatif (R) dengan jumlah katagori, yang apabila disederhanakan dengan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{R}{\text{Jumlah katagori}} ; \quad (3)$$

I = Lebar interval

R= Nilai komulatif tertinggi – nilai komulatif terendah

Dalam penelitian ini variabel kebijaksanaan dan himbauan pemma maupun aturan tradisi di masyarakat dalam pengelolaan mangrove terdiri dari 3 pertanyaan. Jawaban dari item pertanyaan memiliki jenjang skor 1 – 4 dengan katagori tinggi, sedang dan rendah. Kemudian dari skor masing-masing item pertanyaan dijumlahkan atau digabungkan untuk mendapatkan ukuran gabungan atau akumulasi skor. Untuk 3 pertanyaan skor komulatifnya berkisar antara 3 – 12 . Berdasarkan rumus (3) dengan memperhatikan lebar interval (I), skor komulatif ini selanjutnya diklasifikasikan dengan dengan 3 katagori. Adapun I adalah :

$$I = \frac{9}{3} = 3$$

Dengan demikian klasifikasinya adalah;

1. Katagori rendah dengan skor 3 – 5
2. Katagori sedang dengan skor 6 – 9

3. Katagori tinggi dengan skor 10 – 12

Berdasarkan klasifikasi di atas, berikut disajikan kategorisasi respon tingkat ketaatan dan kepatuhan responden terhadap kebijaksanaan dan himbauan pemda maupun peraturan tradisi yang ada di masyarakat tentang pengelolaan hutan mangrove disajikan pada Tabel 12 dibawah ini.

Tabel 12
Komposisi kategorisasi respon ketaatan, kepatuhan responden Terhadap kebijaksanaan dan himbauan Pemda serta aturan tradisi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove

No	Jenis Pekerjaan	Tingkat Ketaatan/Kepatuhan			Jumlah
		Tinggi	Sedang	Rendah	
1.	PNS/ABRI	5	12	2	19
2.	Pensiunan	4	1	2	7
3.	Pedagang	2	3	3	8
4.	Jasa	1	6	2	9
5.	Buruh industri/bang.	-	5	18	23
6.	Nelayan	-	2	32	34
	J u m l a h	12	29	59	100

Sumber : Data Primer (2002)

Berdasarkan Tabel 12 di atas terlihat bahwa respon tingkat ketaatan dan kepatuhan responden terhadap kebijaksanaan dan himbauan pemda serta aturan tradisi masyarakat dalam kategori tinggi sebanyak 12 responden terdiri dari PNS/ABRI 5 responden, pensiunan 4 responden, dagang sebanyak 2 responden, bidang jasa 1 responden. Kategorisasi sedang sebanyak 29 responden yakni PNS/ABRI 12 responden, pensiunan 1 responden, pedagang 3 responden, bidang jasa 6 responden, buruh industri/bangunan 5 responden dan sebanyak 2 responden adalah nelayan. Sedangkan kategori rendah sebanyak 59 responden terdiri dari PNS/ABRI 2 responden, pensiunan 2 responden,

pedagang 3 responden, bidang jasa 2 responden, buruh industri/bangunan 18 responden dan nelayan sebanyak 59 responden.

Respon tingkat ketaatan dan kepatuhan responden terhadap kebijaksanaan dan himbauan pemda serta aturan tradisi di masyarakat didasarkan kepada pemahaman Peraturan Daerah (Perda), himbauan tertulis, himbauan lisan dari Pemda dan peraturan/tradisi masyarakat pada tingkat desa/kelurahan tentang kebijakan pelestarian tanaman/hutan mangrove serta respon masyarakat tentang manfaat kebijakan tersebut baik tertulis, tradisi maupun himbauan lisan.

Hasil pendataan menunjukkan bahwa, sebanyak 60 responden sama sekali tidak mengetahui tentang kebijaksanaan pengelolaan hutan mangrove di daerah mereka, 16 reponden yang hanya mengetahui kebijaksanaan melalui Perda atau hanya himbauan tertulis saja (seruan tertulis), 17 reponden yang mengetahui Perda dan himbauan tertulis tentang kebijaksanaan pengelolaan hutan mangrove, sisanya sebanyak 7 responden hanya mengetahui Perda atau himbauan tertulis dan maupun himbauan lisan saja.

B. Pembahasan

Pembahasan ini menyajikan hasil pengolahan data yang diperoleh dari penelitian lapangan Di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru yang dikaitkan dengan penjelasan teoritik yang diperoleh dari tinjauan pustaka, terutama yang telah dirumuskan dalam hipoteis penelitian. Untuk

mempermudah alur pemikiran, urutan pembahasan akan disesuaikan dengan hipotesis yang diajukan. Ada tiga hal mendasar yang akan dibahas, yakni; (1) tingkat peran serta masyarakat, (2) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran serta masyarakat, dan (3) Intensitas kontribusi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

1. Tingkat Peran Serta Responden

Peran serta seseorang dalam suatu kegiatan pembangunan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor lingkungan sosial, budaya dan ekonomi maupun faktor lingkungan fisiknya. Semakin baik kondisi lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi serta lingkungan fisiknya, maka makin besar seseorang untuk melakukan peran-peran sosial kemasyarakatan lainnya seperti dalam hal pengelolaan hutan mangrove. Oleh karena itu, di masing-masing wilayah, bahkan dalam suatu lingkungan skala kecil sekalipun, peran serta masing-masing individu warga masyarakat sangat bervariasi.

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di lokasi penelitian adalah ditunjukkan oleh beberapa aktivitas responden baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung ke arah peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Hal ini antara lain ditunjukkan ditunjukkan di lokasi penelitian yakni Desa Stagen, Desa Semayap, Kelurahan Kotabaru Hulu, Desa Rampa,

Kelurahan Kotabaru Hilir dan Desa Hilir Muara tidak ada atau belum terbentuk kelompok masyarakat pengelola mangrove, sehingga seluruh responden tidak ada satupun yang menjadi anggota maupun pengurus. Hasil wawancara dengan responden, menunjukkan adanya suatu keinginan untuk mendirikan sebuah kelompok masyarakat pengelolaan mangrove, namun nampaknya keinginan tersebut masih belum mendapat dukungan dan dorongan secara nyata baik dari instansi pemerintah maupun swasta.

Aktifitas lainnya dari masyarakat dalam peran serta pengelolaan hutan mangrove adalah mengikuti forum pertemuan (penyuluhan, pembinaan, diskusi maupun sarasehan dan lain-lain) yang dilaksanakan secara bersama-sama masyarakat dengan petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru. Pada Lokasi penelitian (6 desa) kegiatan penyuluhan pelestarian hutan mangrove/tanaman bakau, masing-masing desa telah mendapatkan 1 – 3 kali kegiatan penyuluhan dan pelaksanaan kegiatan ini baru pertama dilaksanakan yakni pada tahun 2001 yang lalu. Jika dilihat dari intensitas kehadiran masyarakat dalam kegiatan penyuluhan tersebut yakni responden ada yang selalu menghadiri, sering menghadiri, kadang-kadang ada menghadiri dan juga terdapat responden yang sama sekali tidak pernah menghadiri. Disamping itu dalam forum pertemuan penyuluhan terdapat responden yang selalu mengajukan pertanyaan, saran dan usul dalam pengelolaan mangrove, kemudian juga terdapat responden yang kadang-kadang ikut berpartisipasi mengajukan

pertanyaan-pertanyaan dan juga ada yang tidak pernah mengajukan pertanyaan, saran ataupun usulan setiap ada pertemuan.

Pada lokasi penelitian (6 desa) terdapat media yang mendukung dan dapat dipergunakan untuk membahas hutan bakau di lingkungan tempat tinggal mereka. Media tersebut berupa Koran Masuk Desa (KMD) yang terbit 1 minggu sekali. Media ini sering memuat tentang permasalahan lingkungan di daerah pesisir Kalimantan Selatan. Disamping media koran tersebut juga masyarakat dapat memanfaatkan dari media lain, yakni media elektronik radio pemerintah daerah.

Aktifitas masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang tidak menunjang peran serta masyarakat dalam kelestarian hutan mangrove adalah, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir (khususnya nelayan) keluarganya hampir setiap hari memanfaatkan kayu bakau untuk bahan bakar. Pemanfaatan lainnya adalah untuk keperluan peralatan rumah tangga dan untuk bahan bangunan rumah tempat tinggal keluarga.

Bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove lainnya adalah melaksanakan pengawasan interen lingkungan sesama masyarakat dalam bentuk mengingatkan untuk tidak memanfaatkan kayu bakau secara ketergantungan , karena bisa merusak hutan mangrove dan mengganggu keseimbangan lingkungan pantai. Bentuk partisipasi ini bervariasi ada yang selalu mengingatkan, sering mengingatkan, kadang-kadang mengingatkan dan juga terdapat responden yang tidak peduli atau tidak pernah mengingatkan.

Mengingat kondisi hutan mangrove di Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan (rusak), kegiatan rehabilitasi sangat diperlukan. Dalam kegiatan ini respon masyarakat /responden antara lain menyatakan rehabilitasi sangat diperlukan, diperlukan rehabilitasi, rehabilitasi ataupun tidak rehabilitasi sama saja dan juga ada yang menyatakan tidak perlu rehabilitasi.

Kegiatan rehabilitasi lahan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Utara kabupaten Kotabaru telah dilaksanakan oleh Balai Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah Riam Kanan Banjarbaru Kalimantan Selatan bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan penanaman tanaman bakau/mangrove, kegiatan ini masih berlangsung di lokasi penelitian. Dalam kegiatan tersebut keikutsertaan responden bervariasi yakni ada yang selalu ikut berpartisipasi, sering ikut berpartisipasi, kadang-kadang berpartisipasi dan ada yang tidak mau ikut berpartisipasi. Namun mengingat pentingnya fungsi dan pelestarian hutan mangrove tersebut, pada hakekatnya masyarakat setempat menyatakan selalu ingin ikut berpartisipasi, terutama responden yang memahami akan manfaat dan fungsi hutan mangrove bagi lingkungan hidup.

Realitas peran serta masyarakat dalam penelitian ini akan dibedakan menjadi tiga kelompok atau kategori, yakni; **(1) responden yang memiliki tingkat peran serta rendah**, dengan kriteria adalah; a. responden tidak menjadi anggota dalam kelompok pengelola mangrove, b. tidak pernah menghadiri forum pertemuan tentang mangrove, c. selalu memanfaatkan

kayu bakau untuk keperluan kayu bakar, konstruksi bangunan dan peralatan rumah tangga, d. memiliki anggapan hutan mangrove tidak perlu direhabilitasi, e. tidak pernah ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian hutan mangrove. **(2) responden yang memiliki tingkat peran serta sedang**, dengan kriteria adalah; a. responden menjadi anggota dalam kelompok pengelola mangrove dan tidak aktif, b. pernah menghadiri forum pertemuan tentang mangrove tetapi tidak aktif, c. tidak memanfaatkan kayu bakau untuk keperluan kayu bakar, konstruksi bangunan dan peralatan rumah tangga, d. memiliki anggapan hutan mangrove perlu direhabilitasi, e. pernah ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian hutan mangrove, dan f. dan ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian mangrove. **(3) responden yang memiliki tingkat peran serta tinggi**, dengan kriteria adalah; a. responden menjadi anggota dan aktif dalam kelompok pengelola mangrove, b. selalu menghadiri forum pertemuan tentang mangrove, c. tidak pernah memanfaatkan kayu bakau untuk keperluan kayu bakar, konstruksi bangunan dan peralatan rumah tangga, d. memiliki keinginan yang tinggi agar hutan mangrove sangat perlu direhabilitasi, e. selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian hutan mangrove, f. ikut melakukan pengawasan terhadap keberadaan hutan mangrove dan g. selalu ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian hutan mangrove di lingkungannya. Perlu ditegaskan dalam pembahasan ini, penentuan skor atau klasifikasi tinggi rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove hanya merupakan

perbandingan masyarakat Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru yang hanya berlaku di daerah penelitian. Kategori didasarkan atas pengukuran interval (Lampiran 6 -11). Lebar interval (I) diperoleh dengan membagi jarak pengukuran komulatif (R) dengan jumlah katagori, yang apabila disederhanakan dengan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{R}{\text{Jumlah katagori}} \quad ; \quad (4)$$

I = Lebar interval

R= Nilai komulatif tertinggi – nilai komulatif terendah

Dalam penelitian ini variabel peran serta masyarakat (variabel terikat) terdiri dari 10 pertanyaan. Jawaban dari item pertanyaan memiliki jenjang skor 1 – 4 dengan katagori tinggi, sedang dan rendah. Kemudian dari skor masing-masing item pertanyaan dijumlahkan atau digabungkan untuk mendapatkan ukuran gabungan atau akumulasi skor. Untuk 10 pertanyaan skor komulatifnya berkisar antara 10 – 40 . Berdasarkan rumus (4) dengan memperhatikan lebar interval (I), skor komulatif ini selanjutnya diklasifikasikan dengan dengan 3 katagori. Adapun I adalah :

$$I = \frac{30}{3} = 10$$

Dengan demikian klasifikasinya adalah;

1. Katagori rendah dengan skor 10 – 20
2. Katagori sedang dengan skor 21 – 30

3. Katagori tinggi dengan skor 31 – 40

Berdasarkan klasifikasi di atas, berikut disajikan kategorisasi tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove pada Tabel 13 dibawah ini.

Tabel 13
Komposisi responden berdasarkan kategorisai tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove

No	Jenis Pekerjaan	Tingkat Peran Serta Masyarakat			Jumlah
		Tinggi	Sedang	Rendah	
1.	PNS/ABRI	9	9	1	19
2.	Pensiunan	3	2	2	7
3.	Pedagang	4	3	1	8
4.	Jasa	1	5	3	9
5.	Buruh industri/bang.	-	10	13	23
6.	Nelayan	-	2	32	34
	Jumlah	17	31	52	100

Sumber : Data Primer (2002)

Berdasarkan Tabel 13 di atas terlihat bahwa tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dalam kategori tinggi sebanyak 17 responden terdiri dari PNS/ABRI 9 responden, pensiunan 3 responden, pedagang 4 responden, bidang jasa sebanyak 1 responden. Kategori sedang sebanyak 31 responden yakni, PNS/ABRI sebanyak 9 responden, pensiunan 2 responden, pedagang 3 responden, bidang jasa sebanyak 5 responden, buruh industri/bangunan 10 responden dan nelayan sebanyak 2 responden. Selanjutnya tingkat peran serta masyarakat dengan kategorisai rendah sebanyak 52 responden yang terdiri dari PNS 1 responden, pensiunan 2 responden, pedagang 1 responden, bidang jasa 3 responden, buruh industri/bangunan sebanyak 13 responden dan nelayan sebanyak 32 responden.

Komposisi responden berdasarkan kategorisasi tingkat peran serta masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, yang tertinggi adalah PNS/ABRI, kemudian diikuti oleh pedagang, pensiunan, bidang jasa dan pelaksanaan peran serta masyarakat yang terendah adalah dilakukan buruh industri/bangunan dan nelayan.

Jika dibandingkan antar desa/kelurahan, peran serta masyarakat (responden) dalam pengelolaan hutan mangrove di daerah penelitian, kategori tingkat peran serta tertinggi dilakukan oleh 11 responden warga masyarakat Desa Semayap, kemudian disusul Desa Stagen yang dilakukan oleh 2 responden, Kelurahan Kotabaru Hilir sebanyak 2 responden, 1 responden, di Kelurahan Kotabaru Hulu, 1 responden di Desa Rampa dan terakhir 1 responden di desa Hilir Muara. Namun demikian secara keseluruhan berdasarkan komposisi responden, skor tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove cukup baik atau sedang, karena nilai rerata tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di lokasi penelitian menunjukkan angka 21,49 (katagori tingkat sedang).

Mengacu kepada teori Arnstein (1969), yakni menguraikan perbedaan peran serta berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan, maka kategorisasi tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Utara adalah pada tingkat (3) informing dan (4) consulting yang disebut sebagai tingkatan tokenisme atau sekedar formalitas yang memungkinkan

masyarakat untuk mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara. Namun demikian demikian suara dan pendapat mereka belum tentu menjadi bahan bagi pengambilan keputusan. Kondisi bentuk peran serta ini yang ditemukan pada lokasi penelitian. Bentuk peran serta ini perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa sebagian besar tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru adalah cukup baik atau sedang. Kondisi rerata skor kategori tingkat peran serta ini juga dapat digambarkan berdasarkan oleh tingkat pendidikan responden pada Tabel 14.

Tabel 14
Rerata skor tingkat peran serta masyarakat
berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan Responden	Rerata Skor Peran Serta Masyarakat	Kategori
1.	PT/Diploma sederajat	31,33	Tinggi
2.	SMTA/sederajat	22,50	Sedang
3.	SMTTP/sederajat	17,00	Rendah
4.	SD/sederajat	13,30	Rendah

Sumber : Pengolahan Data Primer (2002)

Berdasarkan Tabel 14 di atas, responden berpendidikan Perguruan tinggi/diploma sederajat memberikan rerata skor tingkat peran serta masyarakat yang tinggi yakni sebesar 31,33. Responden berpendidikan SMTA/sederajat rerata skor tingkat peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove sebesar 22,50 dengan kategori sedang. Responden

berpendidikan SMTP/ sederajat rerata skornya adalah 17,00 (kategori rendah) demikian juga halnya dengan responden yang berpendidikan SD/ sederajat sebesar 13,30 (kategori rendah).

Rerata skor tingkat peran serta masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan responden digambarkan pada Tabel 15. Berdasarkan Tabel 15 di bawah, responden dengan jenis pekerjaan PNS/ABRI dan pensiunan dan pedagang masing-masing memberikan rerata skor tingkat peran serta masyarakat yang tinggi yakni sebesar 27,95 dan 27,86 serta 25,63 dengan kategori sedang. Responden dengan jenis pekerjaan dibidang jasa, buruh industri/bangunan dan jenis pekerjaan sebagai nelayan rerata skor tingkat peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove masing-masing sebesar 18,00 dan 14,91 serta 14,71 dengan kategori rendah.

Tabel 15
Rerata skor tingkat peran serta masyarakat
berdasarkan jenis pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan Responden	Rerata Skor Peran Serta Masyarakat	Kategori
1.	PNS/ABRI	27,95	Sedang
2.	Pensiunan	27,86	Sedang
3.	Pedagang	25,63	Sedang
4.	Jasa	18,00	Rendah
5.	Buruh industri/bangunan	14,91	Rendah
6.	Nelayan	14,17	Rendah

Sumber : Pengolahan Data Primer (2002)

Rerata skor tingkat peran serta masyarakat berdasarkan pendapatan perkapita responden digambarkan pada Tabel 16 berikut.

Tabel 16
 Rerata skor tingkat peran serta masyarakat
 berdasarkan pendapatan perkapita

No.	Tingkat Pendapatan Perkapita (axRp 1.000)	Rerata Skor Peran Serta Masyarakat	Kategori
1.	< Rp 1.000	19,68	Rendah
2.	Rp 1.000 – Rp 1.500	24,16	Sedang
3.	Rp 1.500 – Rp 2.000	25,30	Sedang
4.	Rp 2.000 – Rp 2.500	33,17	Tinggi
5.	> Rp 2.500	31,00	Tinggi

Sumber : Pengolahan Data Primer (2002)

Berdasarkan Tabel 16 di atas, responden dengan tingkat pendapatan per kapita < Rp 1.000.000,- memberikan rerata skor tingkat peran serta masyarakat yang rendah yakni sebesar 19,68. Responden dengan tingkat pendapatan perkapita antara Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 dan tingkat pendapatan perkapita antara Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000 rerata skor tingkat peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove masing-masing sebesar 24,16 dan 25,30 dengan kategori sedang. Sedangkan responden dengan pendapatan perkapita antara Rp 2.000.000 – Rp 2.500.000 dan lebih besar dari Rp 2.500.000,- rerata skor tingkat peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove masing-masing sebesar 33,17 dan 31,00 dengan kategori tingkat peran serta tinggi.

Komposisi responden berdasarkan tingkat peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove di masing-masing desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabe 17 berikut.

Tabel 17
Komposisi responden berdasarkan tingkat peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove di masing-masing desa/kelurahan Di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

No.	Desa/Kelurahan	Kategori Tingkat Peran Serta			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Ds. Stagen	5	1	2	8
2.	Ds. Semayap	11	12	12	35
3.	Kel. Kotabaru Hulu	11	4	1	16
4.	Ds. Rampa	10	7	1	18
5.	Kel. Kotabaru Hilir	6	1	2	9
6.	Ds. Hilir Muara	10	3	1	14
	Jumlah	53	28	19	100

Sumber: Data Primer (2002)

Dari Tabel 17 di atas menunjukkan kategori peran serta masyarakat rendah sebanyak 53 responden. Sedang sebanyak 28 responden dan dengan kategori tinggi sebanyak 19 responden. Bila dikaitkan dengan kondisi mangrove yang ada di lapangan, Desa semayap sampai berbatasan dengan Desa Stagen sampai ke selatan Desa Stagen kondisi hutan mangrovenya masih relatif baik, sedangkan kondisi hutan mangrove di Desa Rampa, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kelurahan Kotabaru Hilir dan Desa Hilir Muara kondisi hutan mangrovenya sebagian terkonversi menjadi pemukiman masyarakat, pelabuhan, pertambakan dan fasilitas lainnya. Disamping itu juga mangrove yang masih tersisa di lokasi tersebut kondisinya sudah cukup mengkhawatirkan. Kerusakan ini sudah lama berlangsung, yakni sebagai akibat tekanan penduduk dan dampak resesi perekonomian rakyat. Hal lain juga yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan mangrove pada lokasi penelitian adalah masih rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat, pendapatan masyarakat

yang masih minim dan secara umum kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat mangrove kehidupan dan lingkungan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove

Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis umum bahwa faktor tingkat pendidikan formal, tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, pengetahuan tentang manfaat mangrove, dan kebijaksanaan pengelolaan hutan mangrove mempunyai korelasi positif terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Pembahasan secara terinci disajikan berikut ini.

2.1. Faktor Tingkat Pendidikan formal

Faktor tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan tingkat pengetahuan dan keluasan wawasan yang mampu dikuasai oleh individu warga masyarakat. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan luasnya wawasan dapat memberikan sikap positif dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungannya. Pendidikan juga merupakan faktor utama yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, faktor pendidikan dalam penelitian ini dijadikan sebagai salah satu faktor yang penting untuk diteliti guna mendukung

terwujudnya peran serta masyarakat yang maksimal, wajar dan tanpa paksaan dalam upaya menciptakan tatanan lingkungan yang lestari.

Melihat komposisi responden berdasarkan tingkat pendidikan (Tabel 8) di daerah penelitian, sebagian besar (73,00%) telah mengenyam pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat ke atas dan hanya 27,00% yang mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, sehingga sumberdaya manusianya relatif sudah cukup tinggi dan memungkinkannya untuk merespon secara positif setiap dinamika dan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Dengan komposisi tingkat pendidikan yang relatif sudah tinggi tersebut, maka sangat wajar jika tingkat pendidikan formal responden mempunyai korelasi positif terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui koefisien korelasi dari variabel tingkat pendidikan formal (X1) dengan variabel terikat (Y) adalah sebesar $r = 0,831$ dan $R^2 = 0,691$, dengan nilai t hitung 14,787 dan t tabel 0,01% sebesar 2,576. Oleh karena t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak hal ini menunjukkan adanya korelasi yang erat. Eratnya korelasi antara faktor tersebut ditunjukkan oleh besarnya nilai korelasi (r) sebesar 0,831. Adanya hubungan positif yang sangat nyata dari faktor tingkat pendidikan ini memberikan arti bahwa tingkat peran serta masyarakat tersebut lebih banyak diperankan oleh warga masyarakat (kepala keluarga) yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Nilai $R^2 = 0,691$, menunjukkan

bahwa 69,10% variabel terikat (Y) yakni tinggi tendahnya tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan formal, dan selebihnya yakni 30,10% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperhatikan dalam penelitian ini (Lampiran 10 L-23).

Bentuk hubungan positif yang signifikan tersebut memberikan petunjuk bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove. Oleh karena itu hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan formal dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dapat diterima atau terbukti kebenarannya.

Diterimanya hipotesis tersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini tingkat pendidikan seseorang masih merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan arah dan pola prilakunya dalam merespon dan mensikapi berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan dan lingkungan hidup, seperti juga halnya dengan pengelolaan hutan mangrove. Dengan nilai-nilai pendidikan yang dimilikinya, seseorang akan mampu menentukan sesuatu itu baik atau buruk bagi dirinya maupun lingkungannya, sehingga membimbingnya untuk menciptakan suasana dan kondisi lingkungan yang lestari.

2.2. Faktor Tingkat Pendapatan Perkapita

Komposisi responden berdasarkan pendapatan per kapita (Tabel 9) di daerah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden di bawah

Rp 1.000.000,- per bulan atau pendapatan kelas menengah ke bawah. Rerata tingkat pendapatan perkapita per bulan sebesar Rp 1.120.550,- dan rerata jumlah anggota keluarga sebanyak 4,21 orang per kepala keluarga.

Dilihat dari rerata tingkat pendapatan tersebut, dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan responden di daerah penelitian relatif sudah cukup baik. Dengan rerata tingkat pendapatan tersebut, secara ekonomi, masyarakat Kecamatan Pulau Laut Utara dapat dikatakan relatif mampu memenuhi kebutuhan primernya, serta dapat membagi perhatiannya kepada masalah di luar kebutuhan primernya, seperti menciptakan dan menjaga kondisi lingkungannya.

Terkait dengan rerata tingkat pendapatan yang relatif cukup tinggi tersebut, maka sangat wajar jika terjadi korelasi positif yang nyata antara tingkat pendapatan perkapita dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Berdasarkan hasil analisis, diketahui koefisien dari variabel tingkat pendapatan perkapita responden (X_2) dengan variabel terikat (Y) sebesar $r = 0,712$ dan $R^2 = 0,507$, dengan nilai t hitung sebesar 10,038 dan t tabel 0,01% 2,576. Oleh karena t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak, ini menunjukkan adanya korelasi yang erat. Eratnya korelasi antara tingkat pendapatan perkapita responden (X_2) dengan peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove ditunjukkan oleh nilai korelasi (r) sebesar 0,712. Hal ini berarti bahwa tingkat peran serta responden dalam pengelolaan hutan mangrove lebih banyak dipengaruhi

oleh warga masyarakat (responden) yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi. Nilai $R^2 = 0,507$ menunjukkan bahwa 50,70% variabel terikat (Y) yakni tinggi rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dipengaruhi oleh variabel tingkat pendapatan perkapita dan selebihnya yakni 49,30% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperhatikan dalam penelitian ini. (Lampiran 10 L-26).

Bentuk hubungan positif yang nyata tersebut memberikan petunjuk bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita per bulan, semakin tinggi pula tingkat peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat pendapatan perkapita dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Makin tinggi tingkat pendapatan perkapita makin tinggi peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove dapat diterima kebenarannya.

Adanya hubungan yang positif antara tingkat pendapatan perkapita dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove membuktikan bahwa dengan pendapatan yang relatif tinggi seseorang akan mampu membagi perhatiannya tidak hanya kepada kebutuhan primernya saja, tetapi juga bisa mengalihkan perhatiannya pada penciptaan lingkungan yang baik atau lestari. Untuk menciptakan kondisi lingkungan yang baik salah satunya ditentukan oleh ketersediaan dana. Dengan demikian tingkat pendapatan perkapita juga merupakan salah satu faktor penentu bagi terciptanya tingkat peran serta masyarakat yang

lebih baik dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan hutan mangrove.

2.3. Faktor Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah anggota keluarga dalam penelitian ini juga dijadikan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Hal ini didasari bahwa, jumlah anggota keluarga yang banyak memungkinkan suatu keluarga dapat berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Komposisi responden berdasarkan jumlah anggota keluarga (Tabel 10) di daerah penelitian, sebagian besar (47,00%) beranggotakan 3 – 4 orang per kepala keluarga, dengan rerata jumlah anggota keluarga tersebut hasil analisis adalah, diketahui koefisien dari variabel jumlah anggota keluarga (X3) dengan variabel terikat (Y) sebesar $r = -0,047$ dan $R^2 = 0,221$, dengan t hitung 0,464 dan t tabel 0,05% sebesar 1,960. Oleh karena t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima dan menolak H_1 yang berarti korelasi sangat lemah. Korelasi antara jumlah anggota keluarga (X3) dengan variabel peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove tersebut ditunjukkan oleh nilai korelasi (r) negatif sebesar $-0,047$. Nilai $R^2 = 0,002$ menunjukkan bahwa 0,2,% variabel terikat (Y) yakni tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dipengaruhi oleh variabel jumlah anggota keluarga, dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperhatikan dalam penelitian ini (Lampiran 10 L-27).

Adanya pengaruh negatif ini dari faktor jumlah anggota keluarga dengan tingkat peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove, artinya makin banyak jumlah anggota keluarga, maka tingkat peran sertanya makin kurang. Sebaliknya dengan makin sedikitnya jumlah anggota keluarga tersebut maka tingkat peran sertanya makin tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang menyatakan terdapat korelasi positif antara banyaknya jumlah anggota keluarga dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Makin banyak jumlah anggota keluarga, makin tinggi peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove ditolak kebenarannya. Walaupun diantara kedua variabel tersebut (X3) dengan (Y) menunjukkan hubungan yang negatif, tetapi tidak selalu bahwa jumlah anggota keluarga yang kecil akan diikuti oleh naiknya tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

2.4. Faktor Pengetahuan Manfaat Mangrove

Faktor pengetahuan tentang manfaat mangrove responden juga merupakan faktor yang terkait dengan peran serta seseorang, dimana terdapat anggapan dengan adanya pengetahuan terhadap manfaat sesuatu hal, akan menyebabkan seseorang mempunyai sikap positif terhadap hal tersebut. Selanjutnya dengan sikap positif ini seseorang akan mempengaruhi niat berperan serta pada kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut, khususnya dalam pengelolaan hutan mangrove. Atas dasar anggapan tersebut, faktor pengetahuan tentang manfaat

mangrove dijadikan salah satu faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

Berdasarkan hasil analisis diketahui koefisien dari variabel pengetahuan manfaat mangrove (X4) terhadap variabel terikat (Y) sebesar $r = 0,844$ dan $R^2 = 0,712$, dengan t hitung sebesar 15,554 dan t tabel 0,01% sebesar 2,576. Oleh karena t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak, hal ini menunjukkan adanya korelasi yang erat. Eratnya korelasi antara pengetahuan manfaat mangrove (X4) dengan peran serta masyarakat (Y) menunjukkan bahwa, 71,20% variabel terikat (Y) yakni tinggi rendahnya tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dipengaruhi oleh variabel pengetahuan manfaat mangrove dan selebihnya yakni 28,80% dipengaruhi oleh variabel lain (Lampiran 10 L-28).

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang menyatakan terdapat korelasi positif antara pengetahuan tentang manfaat hutan mangrove dengan peran serta masyarakat. Makin tinggi pengetahuan tentang manfaat mangrove, makin tinggi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dapat diterima kebenarannya.

2.5. Faktor Kebijaksanaan dan Himbauan Pemda

Pemda Kabupaten Kotabaru sejak akhir tahun 1997 telah melaksanakan berbagai kegiatan, guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam menangani masalah lingkungan hidup, termasuk menjaga kelestarian lingkungan pantai. Pemda Kabupaten Kotabaru sebagai sebuah institusi, telah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut

dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan himbauan/seruan tertulis dalam pengelolaan hutan mangrove. Disamping itu juga secara langsung mengadakan kegiatan lapangan yakni melakukan penyuluhan-penyuluhan dan melakukan rehabilitasi hutan mangrove bersama-sama dengan masyarakat dengan menanam tanaman mangrove baru. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami fungsi mangrove dan agar keberadaan hutan mangrove tetap terjaga kelestariannya dan masyarakat hendaknya secara mandiri dapat mengelola hutan mangrove di lingkungan dengan baik.

Disamping itu bentuk pengelolaan hutan mangrove yang sudah ada didalam masyarakat berupa aturan tradisi/kearifan tradisional yang ada dalam pengelolaan hutan mangrove memberikan pengaruh terhadap kepatuhan anggota masyarakat dalam menjaga keberadaan hutan mangrove di lingkungannya.

Berdasarkan hasil analisis diketahui koefisien dari variabel kebijaksanaan dan himbauan pemda Kabupaten Kotabaru (X5) dengan variabel terikat (Y) sebesar $r = 0,849$ dan $R^2 = 0,721$, dengan nilai t hitung sebesar 15,902 dan t tabel 0,01% sebesar 2,576. Oleh karena t hitung > t tabel maka H_0 ditolak, ini berarti terdapat korelasi yang erat. Eratnya korelasi antara kebijaksanaan dan himbauan Pemda serta aturan tradisi masyarakat (X5) dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove ditunjukkan oleh nilai korelasi (r) sebesar 0,844. Hal ini berarti, bahwa tingkat peran serta responden dalam pengelolaan hutan

mangrove dipengaruhi oleh masyarakat yang banyak mengetahui dan memahami peraturan, himbauan/seruan tertulis dan aturan tradisi di masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

Nilai $R^2 = 0,721$ menunjukkan bahwa 72,10% variabel terikat (Y) yakni tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dipengaruhi oleh variabel kebijaksanaan dan himbauan Pemda dan tradisi masyarakat, dan selebihnya yakni 28,80% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperhatikan dalam penelitian ini (Lampiran 10 L-29).

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan terdapat korelasi positif antara kebijaksanaan dan himbauan Pemda Kabupaten Kotabaru dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove, dapat diterima kebenarannya. Dengan kata lain, makin intensif himbauan dari Pemda maka makin tinggi peran serta masyarakatnya. Hal ini juga berarti bahwa kenaikan skor kebijaksanaan dan himbauan Pemda serta aturan tradisi masyarakat akan diikuti oleh kenaikan skor peran serta masyarakat di Kecamatan Pulau laut Utara kabupaten Kotabaru.

3. Kontribusi Faktor-faktor terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

Pembahasan kontribusi faktor-faktor terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di dasarkan atas hasil pembahasan terdahulu (butir b), bermaksud menemukan faktor yang mempunyai pengaruh terbesar dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran serta masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, diketahui koefisien dari kelima variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) dengan variabel terikat (Y)

sebesar $r = 0,920$ dan $R^2 = 0,846$. Besarnya nilai r ($0,920$) tersebut menunjukkan eratnya korelasi antara kelima variabel bebas tersebut secara bersama-sama terhadap variabel terikat (X_6). Nilai $R^2 = 0,846$ menunjukkan bahwa $84,60\%$ variabel terikat (Y) yakni tinggi rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dipengaruhi secara bersama-sama oleh variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5), selebihnya yakni $15,40\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperhatikan.

Hasil analisis regresi berganda dari lima prediktor yakni tingkat pendidikan (X_1), tingkat pendapatan (X_2), jumlah anggota keluarga (X_3), pengetahuan manfaat mangrove (X_4), kebijaksanaan dan himbauan Pemda (X_5) secara bersama-sama terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dengan memperhatikan nilai Beta, menunjukkan adanya perbedaan pengaruh dari masing-masing variabel. Nilai Beta dari kelima variabel tersebut jika disusun dalam persamaan garis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui besarnya peranan masing-masing variabel bebas terhadap variasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove sebagai berikut (Lampiran 11 L-30);

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

$$Y = -1,522 + 2,083X_1 + 2,650X_2 - 0,375X_3 + 1,779X_4 + 0,920X_5$$

Hasil rangkuman analisis korelasi dan regresi berganda faktor-faktor terhadap peran serta masyarakat dapat dilihat pada Tabel 18 dibawah ini.

Tabel 18
Rangkuman analisa uji korelasi dan regresi berganda faktor-faktor terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove

Variabel yang dikorelasikan	Koef. Regresi (B)	Koef. Korelasi (r)	T Hitung	t Tabel 0,01%	Keterangan
Tingkat pendidikan, tingkat Pendapatan, jumlah anggota Keluarga, pengetahuan ttg manfaat mangrove dan kebijaksanaan dan himbauan Pemda (variabel bebas)	2,083 X1	0,831	4,071	2,576	Signifikan
Dikorelasikan dengan Tingkat Peran serta masyarakat (variabel terikat)	2,650 X2	0,712	2,638	2,576	Signifikan
	0,375 X3	-0,047	-1,392	1,960	Tidak Signifikan
	1,779 X4	0,844	3,594	2,576	Signifikan
	0,920 X5	0,849	4,213	2,576	Signifikan

Sumber: Data Primer (2002)

Berdasarkan persamaan regresi berganda tersebut di atas terlihat bervariasi, sehingga dapat diartikan bahwa setiap variabel bebas mempunyai pengaruh yang bervariasi pula terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Besarnya variasi nilai pengaruh dari setiap variabel (X) sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan formal (X1) mempunyai nilai 2,083. Hal ini berarti bila nilai variabel lain (X2, X3, X4, X5) konstan atau tidak berubah, maka setiap kenaikan satu unit angka variabel tingkat pendidikan formal terbakukan akan berakibat naiknya nilai sebesar 2,083 pada variabel tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.
2. Tingkat pendapatan (X2) mempunyai nilai 2,650. Hal ini berarti bila nilai variabel lain (X1, X3, X4, X5) konstan atau tidak berubah, maka setiap kenaikan satu unit angka variabel tingkat pendapatan terbakukan akan berakibat naiknya nilai sebesar 2,650 pada variabel tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

3. Jumlah anggota keluarga (X3) mempunyai nilai $-0,375$. Hal ini berarti bila nilai variabel lain (X1, X2, X4, X5) konstan atau tidak berubah, maka setiap penurunan satu unit angka variabel jumlah anggota keluarga terbakukan akan berakibat naiknya nilai sebesar $0,375$ pada variabel tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.
4. Pengetahuan manfaat mangrove (X4) mempunyai nilai $1,779$. Hal ini berarti bahwa nilai variabel lain (X1, X2, X3, X5) konstan atau tidak berubah, maka setiap kenaikan satu unit angka variabel pengetahuan manfaat mangrove terbakukan atau berakibat naiknya nilai sebesar $1,779$ pada variabel tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.
5. Kebijakan dan himbauan Pemda (X5) mempunyai nilai $0,920$. Hal ini berarti bila nilai variabel lain (X1, X2, X3, X4) konstan atau tidak berubah, maka setiap kenaikan satu unit angka variabel kebijakan dan himbauan Pemda terbakukan akan berakibat naiknya nilai sebesar $0,920$ pada variabel tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

Kenyataan di atas menunjukkan adanya pengaruh yang bervariasi dari setiap variabel bebas terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru. Koefisien regresi t yang terbesar adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan

mangrove. Hasil analisis diketahui bahwa variabel kebijaksanaan dan himbauan pemda dan variabel pendidikan formal memberikan nilai koefisien t yang terbesar yakni 4,213 dan 4,071. Kemudian disusul oleh variabel pengetahuan manfaat mangrove dengan nilai koefisien t sebesar 3,594, kemudian variabel pendapatan perkapita dengan nilai koefisien t sebesar 2,638. Koefisien t yang terkecil adalah variabel jumlah anggota teluarga yakni sebesar -1,392.

Kuatnya pengaruh variabel kebijaksanaan himbauan pemda dan variabel pendidikan formal serta pengetahuan manfaat mangrove, menandakan bahwa dengan kebijaksanaan dan himbauan pemda yang efisien dan efektif dengan melibatkan partisipasi masyarakat, pendidikan yang tinggi serta pengetahuan yang cukup tentang manfaat mangrove maka akan diiringi oleh rasa, tingkat kesadaran dan perhatian yang lebih baik terhadap masalah-masalah lingkungan hidup. Hal ini dapat terjadi, karena, karena tingkat pendidikan, pengetahuan dan kebijaksanaan dan himbauan pemda yang lebih baik juga akan ditandai oleh tingkat pendapatan yang relatif cukup bagi pemenuhan kebutuhannya, sehingga dengan landasan ilmu pengetahuan yang dimilikinya akan mengantarkannya kepada upaya-upaya penciptaan suasana lingkungan lestari.

Analisa varian kontribusi faktor-faktor terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove menunjukkan nilai F hitung sebesar 103,613 dan F tabel 0,01% sebesar 6,85. Oleh karena F

hitung > F tabel, berarti H_0 ditolak dan menerima H_1 . Ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat nyata. Analisa varian kontribusi faktor-faktor tersebut dapat di lihat pada Tabel 19 di bawah ini.

Tabel 19
Analisa varian kontribusi faktor-faktor
Terhadap peran serta masyarakat dalam
Pengelolaan hutan mangrove

Sumber	Jumlah Kuadrat	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah	F hitung	F Tabel (0,01%)
Regresi	5566,905	5	1113,381	103,613	3,17
Residu	1010,085	94	10,746		
Total	6576,990	99			

Sumber: Data Primer (2002)

C. Implikasi Perencanaan Pematapan Pengelolaan Hutan Mangrove Di kabupaten Kotabaru

Dinamika kehidupan manusia yang semakin maju dan kompleks membawa pengaruh pada perubahan sikap, pola perilaku dan pandangan hidup serta tingkat kesadarannya terhadap lingkungan sekitarnya. Bagi masyarakat kelompok yang maju dan memiliki strata sosial ekonomi dan budaya yang lebih baik, menipisnya keberadaan hutan mangrove, dianggap sebagai suatu masalah yang harus diatasi, tetapi bagi masyarakat dengan strata pendidikan, sosial ekonomi dan budaya yang kurang baik, keberadaan hutan mangrove kurang dianggap sebagai masalah serius yang harus ditangani.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Utara kabupaten Kotabaru menunjukkan rerata skor yang cukup baik yakni 21,49 (sedang) rerata tersebut didukung secara

signifikan oleh faktor kebijaksanaan dan himbauan pemda dan aturan tradidisi di masyarakat serta faktor pendidikan formal. Variabel ini secara bersama-sama terbukti menyumbang nilai koefisien regresi t tertinggi yakni 4,213 dan 4,071 dibandingkan dengan variabel lainnya dalam penelitian ini. Variabel lainnya yakni tingkat pengetahuan mangrove dengan nilai koefisien regresi t sebesar 3,594, tingkat pendapatan perkapita sebesar 2,638 dan variabel jumlah anggota keluarga sebesar - 1,392.

Kenyataan di atas membuktikan sudah mulai ada kepercayaan terhadap produk hukum dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah secara nasional, dan tidak terkecuali pada tingkat Pemda Kabupaten Kotabaru. Ini menyatakan produk hukum dan langkah-langkah strategi ataupun yang dilakukan oleh pemda, termasuk inisiatif menghimbau atau mengajak masyarakatnya untuk mengelola hutan mangrove mulai diperhatikan dengan baik. Hasil penelitian ini memang menunjukkan skor rerata tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang sudah cukup baik, tetapi skor tersebut kebanyakan berangkat dari kesadaran dan kemandirian masyarakat sendiri terhadap dampak negatif masalah hutan mangrove.

Berdasarkan hal tersebut untuk menjaga dan mengelola kelestarian hutan mangrove yang berkelanjutan diperlukan pengambilan langkah-langkah yang selalu melibatkan atau mengakomodasi partisipasi masyarakat setempat untuk menyusun strategi/perencanaan ke depan

bagi upaya peningkatan kesadaran warga masyarakatnya untuk lebih berperan serta dalam segala aktivitas pembangunan lingkungan khususnya dalam pengelolaan hutan mangrove. Langkah-langkah perencanaan yang dibuat harus mampu menyentuh kesemua lapisan atau strata sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Aspek kehadiran aparat pemda Kabupaten Kotabaru dalam wujud produk hukum dan implementasi produk hukum di lapangan serta kegiatan dilapangan tetap harus dibutuhkan dan ditingkatkan mengingat di masa-masa mendatang permasalahan keberadaan hutan mangrove dengan segala persoalan yang menyertainya yang semakin meningkat dan rumit.

Guna memantapkan strategi perencanaan pemda ke depan dalam semua aspek, maka langkah awal yang penting dilakukan adalah terus melakukan perbaikan-perbaikan secara internal, baik pada aspek revitalisasi produk hukumnya dan pengadaan sumberdaya manusia yang betul-betul memahami dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Disamping itu, juga penting dipahami bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat akan dampak negatif kerusakan hutan mangrove merupakan langkah awal yang lebih konkrit untuk berperan serta di dalamnya, sehingga dapat dijadikan tumpuan utama untuk proses perencanaan dan pengelolaan selanjutnya. Memasukan aspek peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkungan bukan tanpa konsekwensi, namun demikian peran serta masyarakat akan membuahkan keuntungan dalam jangka panjang (Hadi, 2001). Perencanaan pengelolaan hutan

mangrove yang *acceptable* dimata masyarakat akan terjamin keberlanjutannya. Dalam proses pengelolaan hutan mangrove ini, harus dihindari agar masyarakat tidak sekedar ikut serta di dalamnya , karena keikutsertaan lebih bersifat sekunder dan suplementer bahkan sangat semu (*pseudo partisipation*), tetapi yang harus diupayakan adalah peran sertanya yang lebih memiliki sifat dinamis dan emansipatoris, sehingga permasalahan hutan mangrove benar-benar dapat diatasi atau dikelola dengan baik.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membantu proses di atas adalah :

1. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat secara intensif melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan non formal serta media masa cetak dan elektronik.
2. Meningkatkan dan mengupayakan terbentuknya pola jaringan kerja sama dengan semua elemen masyarakat termasuk LSM yang peduli maupun yang tidak peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, khususnya masalah hutan mangrove.
3. Meningkatkan penegakan hukum bagi individu, kelompok, institusi atau lembaga lainnya yang melakukan pengrusakan terhadap hutan mangrove.
4. Menumbuhkan masyarakat sipil yang kuat sehingga mampu secara mandiri melaksanakan fungsi kontrol terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan permasalahan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Kotabaru, khususnya di Kecamatan Pulau laut Utara langkah

kedepan dalam rangka tujuan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta fungsi perlindungan dan pelestarian hutan mangrove maka diperlukan pengembangan dan peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove terutama melalui peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan dan penataan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Ketiga kondisi tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia, sehingga strategi pengembangannya dapat meliputi kegiatan:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia yang terkait dengan pengelolaan hutan mangrove sangat diperlukan. Peningkatan sumberdaya manusia ini meliputi berbagai upaya, termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, baik formal maupun informal, melalui kegiatan pendidikan dan latihan keterampilan khusus yang mencakup aspek-aspek perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan dalam pengelolaan hutan mangrove.

2. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat

Kelestarian hutan mangrove sangat terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dimana sebagian besar di pesisir Kecamatan Pulau laut Utara penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Hutan mangrove Di Kecamatan Pulau laut Utara mempunyai potensi untuk didayagunakan secara berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu diperlukan strategi peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara terintegrasi melalui berbagai kegiatan pembangunan. Peningkatan pendapatan masyarakat dilaksanakan tanpa merusak hutan mangrove bahkan memberikan jaminan bahwa hutan mangrove akan tumbuh secara lestari.

3. Pengembangan kelembagaan

Peran serta pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove perlu dikembangkan dan dibina secara terkoordinasi oleh pemerintah daerah secara intensif dan berkelanjutan.

4. Peningkatan penataan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Upaya penataan pelaksanaan peraturan perundang-undangan meliputi pemasyarakatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove serta pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat dibuat beberapa kesimpulan dan saran, baik untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan ataupun untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sesuai dengan penelitian ini.

A. Kesimpulan

1. Sebagian besar responden 47 KK (47,00%) warga masyarakat Kecamatan Pulau Laut Utara kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan berperan serta dalam pengelolaan hutan mangrove. Rerata skor tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove sebesar 21,49 (katagori tingkat sedang).
2. Rerata skor tingkat peran serta masyarakat (katagori sedang) ini dipengaruhi secara nyata terutama oleh faktor kebijaksanaan dan himbauan Pemda, tingkat pendidikan formal, tingkat pengetahuan tentang manfaat mangrove dan tingkat pendapatan perkapita yang relatif sudah cukup baik.
3. Sumbangan beberapa faktor yang mempunyai korelasi dan pengaruh terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove sebagai berikut:
 - a. Faktor kebijaksanaan dan himbauan Pemda mempunyai korelasi positif yang sangat erat dengan peningkatan peran serta

- masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dengan nilai r sebesar 0,849 dan $R^2 = 0,721$ pada taraf kepercayaan 99%.
- b. Faktor tingkat pengetahuan tentang mangrove mempunyai korelasi positif yang sangat erat dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dengan nilai r sebesar 0,844 dan $R^2 = 0,712$ pada taraf kepercayaan 99%.
 - c. Tingkat pendidikan formal mempunyai korelasi positif yang sangat erat dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dengan nilai r sebesar 0,831 dan $R^2 = 0,691$ pada taraf kepercayaan 99%.
 - d. Faktor tingkat pendapatan perkapita mempunyai korelasi positif yang sangat erat dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dengan nilai r sebesar 0,712 dan $R^2 = 0,507$ pada taraf kepercayaan 99%.
 - e. Faktor Jumlah anggota keluarga tidak memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove, diman nilai korelasinya negatif yakni r sebesar $-0,047$ dan $R^2 = 0,002$.
4. Adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove membuktikan sudah ada tumbuh kesadaran dan pemahaman masyarakat akan dampak negatif kerusakan hutan mangrove dan mulai ada perhatian, kepercayaan terhadap kebijaksanaan dan himbuan pemda maupun langkah-langkah yang dilakukan oleh

pemerintah secara nasional dan tidak terkecuali pada tingkat Pemda Kabupaten Kotabaru.

B. Saran-saran

1. Mengingat pentingnya upaya yang terpadu dalam menjaga kelestarian hutan mangrove guna keseimbangan lingkungan hidup, maka mengelola dan menjaga kelestariannya adalah suatu keharusan masing-masing individu masyarakat. Upaya ke arah peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
2. Faktor kebijaksanaan dan himbauan pemda, faktor tingkat pengetahuan, faktor tingkat pendidikan dan faktor pendapatan perkapita terbukti memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Oleh karena itu kebijaksanaan dan himbauan pemda perlu terus dilakukan secara intensif dan meningkatkan derajat pendidikan, pengetahuan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal perlu dilakukan agar mampu membangkitkan kesadaran murni dari masyarakat untuk selalu memelihara, menjaga kelestarian hutan mangrove dan lingkungan hidupnya.
3. Guna memantapkan strategi perencanaan Pemda ke depan dalam semua aspek terutama dalam pengelolaan hutan mangrove, langkah yang disusun harus mampu menyentuh kesemua lapisan atau strata

sosial ekonomi dan budaya masyarakat dengan selalu melibatkan atau mengakomodasi partisipasi masyarakat setempat dan terus melakukan perbaikan-perbaikan secara internal, baik pada aspek revitalisasi produk hukumnya dan pengadaan sumberdaya manusia yang betul-betul memahami dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

4. Perlu dikembangkan strategi untuk pengelolaan hutan mangrove lestari di Kabupaten Kotabaru, yang meliputi:
 - a. Peningkatan sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat.
 - b. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat
 - c. Pengembangan kelembagaan dan peningkatan tugas dan fungsi lembaga yang ada, baik lembaga formal maupun informal.
 - d. Peningkatan penataan pelaksanaan peraturan perundang-undangan melalui upaya pemasyarakatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove, serta mempertegas pelaksanaan sanksi terhadap para pelanggar. Pelaksanaan penataan peraturan perundang-undangan ini dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi, baik kepada masyarakat maupun kepada aparat pemerintahan.

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup di dunia ditandai dengan dimulainya kesepakatan semua negara Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup Di Stockholm tanggal 15 – 16 Juni 1972.

Peran serta masyarakat merupakan proses dimana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan tentang apa yang akan direncanakan/dilakukan, program dan kebijakan. Keikutsertaan masyarakat sangat penting dalam menyusun suatu perencanaan. Pentingnya peran serta masyarakat tersebut didasarkan atas beberapa alasan. Pertama, masyarakat berhak mengetahui tentang setiap rencana pembangunan yang secara potensial mempengaruhi kehidupan mereka, kedua masyarakat adalah local expert tentang lingkungan di sekitarnya, sehingga dalam penyusunan perencanaan pendapat dan gagasan masyarakat layak didengar, agar tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan akan workable.

Berbagai masalah lingkungan yang timbul disebabkan karena berbagai sumber, namun demikian masalah lingkungan sebenarnya terkait dengan masalah perilaku dan tanggung jawab manusia dalam kapasitasnya sebagai individu atau sebagai lembaga/badan hukum secara keseluruhan.

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat sehingga terbentuk rasa tanggung jawab yang tercermin dalam perilaku manusia, maka diperlukan pengembangan partisipasi masyarakat. Masyarakat disini dapat dilihat dari dua sisi : pertama masyarakat masih belum peduli terhadap pentingnya menjaga fungsi ekologis lingkungan hidup dan kedua adalah masyarakat yang sudah peduli lingkungan dan potensial untuk merubah sikap perilaku masyarakat yang belum sadar lingkungan. Pengembangan peran serta masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya melainkan dengan program secara berkelanjutan untuk menanamkan kesadaran masyarakat dengan cara mengembangkan, memberikan rangsangan, memelihara dan dengan menciptakan iklim yang kondusif disertai pemberian ruang gerak dan akses yang memadai.

Kabupaten Kotabaru adalah salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 14.489,69 KM² (35,27%) dari luas wilayah Kalimantan Selatan yang wilayahnya didominasi oleh perairan laut serta salah satu diantara 3 (tiga) kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai garis pantai yang panjang (Kotabaru Dalam Angka, 2000). Kabupaten Kotabaru terdiri dari 20 kecamatan, satu diantaranya, yaitu Kecamatan Pulau Laut Utara yang terletak di wilayah pesisir Selat Laut. Kecamatan ini sangat potensial dan sedang mengalami perkembangan. Kecamatan Pulau Laut Utara dimana Ibukota Kabupaten Kotabaru berada dan dewasa ini berfungsi sebagai kota pemerintahan,

pendidikan, industri dan berbagai fasilitas perkotaan tumbuh dan berkembang.

Perkembangan kecamatan tersebut relatif lebih cepat dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya karena pertumbuhan penduduk yang tinggi, hingga mengakibatkan tingginya berbagai kebutuhan, misalnya kebutuhan akan lahan untuk penyediaan tempat tinggal keluarga dan berbagai kegiatan lainnya, khususnya untuk kegiatan budidaya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penguasaan lahan pada kawasan hutan mangrove atau non budidaya untuk kawasan budidaya. Dampak lanjutan dari keadaan tersebut adalah terjadi perusakan kawasan-kawasan berfungsi lindung, diantaranya yang terjadi adalah rusaknya hutan mangrove (hutan bakau). Kondisi hutan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Utara tersebut umumnya dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mencoba mengangkat permasalahan Peran Serta Masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam yakni hutan mangrove dari pengrusakan yang tidak terkendali secara besar-besaran disepanjang pesisir Selat Pulau Laut Kotabaru Kalimantan Selatan.

Kebijakan pemerintah dan berbagai upaya yang telah dilakukan pada prinsipnya dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, di bidang lingkungan hidup khususnya dalam hal pengelolaan hutan mangrove. Namun demikian berbagai

macam kebijakan pemerintah tersebut tampaknya belum sepenuhnya mampu mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan mangrove. Oleh karena itu, maka peran serta masyarakat masih membutuhkan perhatian serius dari semua pihak yang terkait. Hal ini penting untuk menghindari kecenderungan terjadinya *partisipasi semu* (pseudo participation) dari warga masyarakat. Dalam konteks peran serta semacam ini, berarti bahwa warga masyarakat tidak mengerti dan paham tentang apa dan untuk apa mereka harus melakukan suatu kegiatan pembangunan, atau lebih spesifik lagi dalam mengelola hutan mangrove.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diteliti penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.
2. Bagaimanakah faktor-faktor peran serta masyarakat dalam mencegah kerusakan hutan mangrove tersebut, baik faktor yang menghambat ataupun faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan peran serta masyarakat.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM**

PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat peran serta masyarakat pesisir Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dalam hal pengelolaan hutan mangrove.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran serta masyarakat pesisir Kabupaten Kotabaru dalam pengelolaan hutan mangrove.

C. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk antara lain : (1) sebagai sumbangan bagi pengembangan pengetahuan dalam kaitannya dengan peningkatan motivasi dan peran serta masyarakat dalam semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan mangrove; (2) sebagai bahan masukan bagi pemerintah pada umumnya, khususnya Pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan dalam menetapkan kebijaksanaan dan langkah-langkah operasional pengelolaan hutan mangrove (kawasan cagar alam), (3) sebagai bahan acuan dan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud mengadakan penelitian sejenis di tempat lain.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan: (1) Mengkaji tingkat peran serta masyarakat

pesisir dalam pengelolaan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, (2) mengkaji faktor-faktor peranserta masyarakat pesisir yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Saenger (1993), hutan mangrove sering pula disebut sebagai hutan bakau atau hutan payau. Dinamakan hutan bakau oleh karena sebagian besar vegetasinya didominasi oleh jebis bakau (*Rhizophora spp.*), dan disebut hutan payau oleh karena hutannya tumbuh diatas tanah yang selalu tergenang oleh air payau. Arti kata mangrove itu sendiri digunakan untuk masyarakat tumbuh-tumbuhan (*Hidrosere communities*) dari beberapa species.

Steenis (Hardjosuwarno, 1993) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh diantara garis pasang surut, sehingga hutan mangrove dinamakan juga hutan pasang. Hutan mangrove terjadi di daerah pantai yang terus menerus atau berurutan terbenam dalam air laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Tanahnya terdiri dari pasir dan lumpur.

1. Clark (1974), mengemukakan bahwa peranan hutan mangrove secara umum adalah sebagai zone penyangga stabilitas ekosistem pantai. Peran mangrove secara khusus, yang tidak bisa digantikan oleh

ekosistem lain adalah fungsi gandanya yaitu fungsi fisik dan fungsi biologisnya.

Hubungan manusia dengan lingkungannya ternyata tidak hanya berjalan sebelah, tetapi antara manusia dengan lingkungannya terdapat hubungan yang saling timbal balik. Lingkungan dapat mempengaruhi individu melalui rangsangan atau stimulus yang berasal dari lingkungan itu dan manusia juga dapat memberikan pengaruh kepada lingkungan melalui respon atau tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya (Soemarwoto, 1994).

Menurut Ancok (1992) terdapat anggapan bahwa dengan adanya pengetahuan terhadap manfaat suatu hal, akan menyebabkan seseorang mempunyai sikap positif terhadap hal tersebut. Selanjutnya, sikap positif seseorang akan mempengaruhi niat berperan serta pada kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pentingnya peran serta masyarakat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dinyatakan bahwa peran serta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus makin meluas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan ataupun pula dalam menerima hasil pembangunan. Untuk itu perlu diciptakan suasana kemasyarakatan yang mendukung cita-cita pembangunan, serta terwujudnya kreativitas dan aktivitas dikalangan rakyat.

Menurut Hadi (1995) dari segi kualitas, partisipasi atau peran serta masyarakat penting sebagai : (a) input atau masukan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan, (b) strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat sehingga kredibilitas keputusan akan sah, (c) komunikasi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat, aspirasi dan concern masyarakat, (d) media pemecahan masalah untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan konflik untuk memperoleh konsesus, (e) terapi sosial untuk menyembuhkan penyakit sosial seperti rasa keterasingan (alination), rasa kurang percaya diri (powerlessness).

F. Landasan Teori

Jika dilihat dari frekuensi maupun jenis peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove kemungkinan besar bervariasi. Adanya variasi ini disebabkan oleh berbagai faktor dan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti tingkat pendidikan formal masyarakat, tingkat pendapatan per kapita, jumlah anggota keluarganya, pengetahuan tentang manfaat hutan mangrove sebagai faktor intern dan juga berpengaruh dari faktor ekstern seperti kebijakan, himbauan-himbauan dari pemerintah daerah.

G. Asumsi dan Hipotesis Penelitian

Untuk kelancaran penelitian ini ada tiga asumsi dasar yang perlu dipegang sebagai acuan : (1) warga masyarakat Kecamatan Pulau Laut

Utara di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan terdiri atas individu-individu yang mempunyai latar belakang kehidupan sosial ekonomi yang berbeda-beda baik pendidikan, pendapatan, pengetahuan, budaya dan pekerjaannya; (2) warga masyarakat Kecamatan Pulau Laut Utara dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan hutan mangrove masing-masing bervariasi baik cara maupun intensitasnya.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan formal dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Makin tinggi tingkat pendidikan formal, makin tinggi tingkat peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove.
2. Terdapat korelasi positif antara tingkat pendapatan per kapita dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Makin tinggi tingkat pendapatan per kapita makin tinggi peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove.
3. Terdapat korelasi positif antara jumlah anggota keluarga dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Makin banyak jumlah anggota keluarga, makin tinggi peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove.
4. Terdapat korelasi positif antara pengetahuan tentang manfaat hutan mangrove dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Makin banyak informasi pengetahuan tentang manfaat

hutan mangrove, makin tinggi peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove.

5. Terdapat korelasi positif antara Kebijakan dan himbauan Pemda Kabupaten Kotabaru dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Makin intensif himbauan dari Pemda maka makin tinggi peran masyarakatnya.

H. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah penelitian survai dengan tipe explanatory.

Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah 6.824 kepala keluarga yang tinggal di 4 desa dan 2 kelurahan yang ada di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Populasi penelitian ini adalah masyarakat pesisir Kelurahan dan desa di Kecamatan Pulau Laut Utara yang memiliki sebaran hutan mangrove.

Besarnya jumlah sampel yang diambil dari 6.824 kepala keluarga adalah sebanyak 100 kepala keluarga. Pengambilan sampel sejumlah tersebut sudah dianggap representatif, mengingat karakteristik atau sifat sampelnya yang homogen.

I. Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka analisis data didahului dengan membuat katagori. Katagori jawaban responden dilakukan dengan memberi nilai atau skor terhadap item pertanyaan yang diajukan tentang,

pengetahuan responden terhadap mangrove, kebijakan dan himbauan pemda peran serta masyarakat dalam pengelolaan mangrove.

Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan analisis tabel dan analisis statistik. Analisis tabel didasarkan kepada tabel frekuensi dan teknik analisis statistik yang digunakan adalah analisis uji beda dengan dua rata-rata "T" test, analisis korelasi sederhana (r), analisis varian, analisis regresi berganda.

J. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin di daerah penelitian menunjukkan bahwa, terdapat 91 responden (91,00%) adalah laki-laki sisanya sebanyak 9 responden (9,00%) adalah perempuan. Umur

Responden

Komposisi responden berdasarkan tingkatan umur didominasi oleh kelompok umur 31 tahun sampai dengan 40 tahun yakni sebesar 44 responden, Kelompok umur 51 – 60 tahun sebanyak 14 responden, Dibawah 30 tahun sebanyak 7 responden, dan kelompok umur lebih dari 60 tahun yang terdiri dari pensiunan 3 responden .

Jenis pekerjaan responden di daerah penelitian bervariasi, yakni terdiri dari PNS/ABRI dan pensiunan, pedagang, jasa, buruh industri/bangunan dan nelayan. jenis pekerjaan responden yang terbesar adalah nelayan sebanyak 34 responden Kemudian pekerjaan sebagai buruh industri dan

bangunan 23 responden PNS/ABRI sebanyak 19 responden Pekerjaan sebagai pedagang sebanyak 8 responden.

Tingkat pendidikan responden terbanyak berturut-turut adalah SMTA atau sederajat sebanyak 39 responden, SD atau sederajat sebanyak 27 responden, dan 34 responden lainnya adalah sebagai nelayan. Perguruan Tinggi/Diploma atau sederajat

Tingkat pendapatan per kapita responden bervariasi. Secara umum pendapatan responden di daerah penelitian menunjukkan bahwa terdapat 57 responden yang berpenghasilan kurang dari Rp 1000.000,- per bulan Kemudian sebanyak 21 responden berpenghasilan antara Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000,- per kapita, Selanjutnya responden dengan pendapatan perkapita antara Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000,- yakni sebanyak 7 responden. Pendapatan perkapita Rp 2.000.000 – Rp 2.500.000,- terdapat 12 responden.

sebagian besar reponden di daerah penelitian, kebanyakan anggota keluarganya berjumlah 3 – 4 orang per responden sebanyak 47 responden Kemudian keluarga beranggotakan 5 – 6 orang per kepala keluarga sebanyak 39 responden, sisanya sebanyak 2 responden beranggotakan lebih dari 6 orang per kepala keluarga. Pengatahuan responden yang didasarkan kepada pengetahuan tentang manfaat hutan mangrove sangat bervariasi yakni dari tingkat pengetahuan dengan katagori rendah, sedang sampai tinggi.

Pengetahuan responden tentang mangrove didasarkan kepada pemahaman, manfaat, mengikuti penyuluhan/pembinaan tentang tanaman mangrove dan pendapat responden tentang perlunya penyuluhan tentang tanaman mangrove kepada masyarakat di sekitar lingkungannya.

Karakteristik responden terhadap kebijaksanaan pengelolaan hutan mangrove baik yang berasal dari Pemerintah berupa peraturan perundang-undangan maupun yang berasal dari masyarakat yakni berupa tradisi yang berlaku di dalam masyarakat ataupun himbauan-himbauan dengan kondisinya yang bervariasi. Hal ini didasarkan kepada respon tingkat ketaatan dan kepatuhan dengan kategorisasi tinggi, sedang dan rendah.

K. Pembahasan

Pembahasan ini menyajikan hasil pengolahan data yang diperoleh dari penelitian lapangan Di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Ada tiga hal mendasar yang akan dibahas, yakni; (1) tingkat peran serta masyarakat, (2) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran serta masyarakat, dan (3) Intensitas kontribusi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

Tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dalam kategori tinggi sebanyak 17 responden, Kategori sedang sebanyak

31 dan selanjutnya tingkat peran serta masyarakat dengan kategorisasi rendah sebanyak 52 responden

Komposisi responden berdasarkan kategorisasi tingkat peran serta masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, yang tertinggi adalah PNS/ABRI, kemudian diikuti oleh pedagang, pensiunan, bidang jasa dan pelaksanaan peran serta masyarakat yang terendah adalah dilakukan buruh industri/bangunan dan nelayan.

Berdasarkan tingkat berpendidikan, responden berpendidikan Perguruan tinggi/diploma sederajat memberikan rerata skor tingkat peran serta masyarakat yang tinggi yakni sebesar 31,33. Responden berpendidikan SMTA/sederajat rerata skor tingkat peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove sebesar 22,50 dengan kategori sedang. Responden berpendidikan SMTP/sederajat rerata skornya adalah 17,00 (kategori rendah) demikian juga halnya dengan responden yang berpendidikan SD/sederajat sebesar 13,30 (kategori rendah).

Tingkat pendapatan per kapita responden < Rp 1.000.000,- memberikan rerata skor tingkat peran serta masyarakat yang rendah yakni sebesar 19,68. Responden dengan tingkat pendapatan perkapita antara Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 dan tingkat pendapatan perkapita antara Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000 rerata skor tingkat peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove masing-masing sebesar 24,16 dan 25,30 dengan kategori sedang. Sedangkan responden dengan pendapatan perkapita antara Rp 2.000.000 – Rp 2.500.000 dan lebih besar dari Rp

2.500.000,- rerata skor tingkat peran sertanya dalam pengelolaan hutan mangrove masing-masing sebesar 33,17 dan 31,00 dengan kategori tingkat peran serta tinggi.

L. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove

Berdasarkan hasil analisis, diketahui koefisien korelasi dari variabel tingkat pendidikan formal (X1) dengan variabel terikat (Y) adalah sebesar $r = 0,831$ dan $R^2 = 0,691$, dengan nilai t hitung 14,787 dan t tabel 0,01% sebesar 2,576. Oleh karena t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak hal ini menunjukkan adanya korelasi yang erat. Berdasarkan hasil analisis, diketahui koefisien dari variabel tingkat pendapatan perkapita responden (X2) dengan variabel terikat (Y) sebesar $r = 0,712$ dan $R^2 = 0,507$, dengan nilai t hitung sebesar 10,038 dan t tabel 0,01% 2,576. Oleh karena t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak, ini menunjukkan adanya korelasi yang erat.

Jumlah anggota keluarga dalam penelitian ini juga dijadikan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Hal ini didasari bahwa, jumlah anggota keluarga yang banyak memungkinkan suatu keluarga dapat berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil analisis adalah, diketahui koefisien dari variabel jumlah anggota keluarga (X3) dengan variabel terikat (Y) sebesar $r = - 0,047$ dan $R^2 = 0,221$, dengan t hitung 0,464 dan t tabel 0,05% sebesar 1,960. Oleh

karena t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima dan menolak H_1 yang berarti korelasi sangat lemah. Korelasi antara jumlah anggota keluarga (X3) dengan variabel peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove tersebut ditunjukkan oleh nilai korelasi (r) negatif sebesar $-0,047$.

Faktor pengetahuan tentang manfaat mangrove responden juga merupakan faktor yang terkait dengan peran serta seseorang, dimana terdapat anggapan dengan adanya pengetahuan terhadap manfaat sesuatu hal, akan menyebabkan seseorang mempunyai sikap positif terhadap hal tersebut. Berdasarkan hasil analisis diketahui koefisien dari variabel pengetahuan manfaat mangrove (X4) terhadap variabel terikat (Y) sebesar $r = 0,844$ dan $R^2 = 0,712$, dengan t hitung sebesar $15,554$ dan t tabel $0,01\%$ sebesar $2,576$. Oleh karena t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak, hal ini menunjukkan adanya korelasi yang erat.

Berdasarkan hasil analisis diketahui koefisien dari variabel kebijaksanaan dan himbauan pemda Kabupaten Kotabaru (X5) dengan variabel terikat (Y) sebesar $r = 0,849$ dan $R^2 = 0,721$, dengan nilai t hitung sebesar $15,902$ dan t tabel $0,01\%$ sebesar $2,576$. Oleh karena t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak, ini berarti terdapat korelasi yang erat.

M. Kontribusi Faktor-faktor terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

Pembahasan kontribusi faktor-faktor terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di dasarkan atas hasil pembahasan terdahulu (butir b), bermaksud menemukan faktor yang mempunyai

pengaruh terbesar dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran serta masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, diketahui koefisien dari kelima variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5) dengan variabel terikat (Y) sebesar $r = 0,920$ dan $R^2 = 0,846$. Besarnya nilai r (0,920) tersebut menunjukkan eratnya korelasi antara kelima variabel bebas tersebut secara bersama-sama terhadap variabel terikat (X6). Nilai $R^2 = 0,846$ menunjukkan bahwa 84,60% variabel terikat (Y) yakni tinggi rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dipengaruhi secara bersama-sama oleh variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5), selebihnya yakni 15,40% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperhatikan.

Hasil analisis regresi berganda dari lima prediktor, jika disusun dalam persamaan garis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui besarnya peranan masing-masing variabel bebas terhadap variasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

$$Y = -1,522 + 2,083X_1 + 2,650X_2 - 0,375X_3 + 1,779X_4 + 0,920X_5$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda tersebut di atas terlihat bervariasi, sehingga dapat diartikan bahwa setiap variabel bebas mempunyai pengaruh yang bervariasi pula terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Besarnya variasi nilai pengaruh dari setiap variabel (X) sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan formal (X_1) mempunyai nilai 2,083. Hal ini berarti bila nilai variabel lain (X_2, X_3, X_4, X_5) konstan atau tidak berubah, maka setiap kenaikan satu unit angka variabel tingkat pendidikan formal terbakukan akan berakibat naiknya nilai sebesar 2,083 pada variabel tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.
2. Tingkat pendapatan (X_2) mempunyai nilai 2,650. Hal ini berarti bila nilai variabel lain (X_1, X_3, X_4, X_5) konstan atau tidak berubah, maka setiap kenaikan satu unit angka variabel tingkat pendapatan terbakukan akan berakibat naiknya nilai sebesar 2,650 pada variabel tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.
3. Jumlah anggota keluarga (X_3) mempunyai nilai $-0,375$. Hal ini berarti bila nilai variabel lain (X_1, X_2, X_4, X_5) konstan atau tidak berubah, maka setiap penurunan satu unit angka variabel jumlah anggota keluarga terbakukan akan berakibat naiknya nilai sebesar 0,375 pada variabel tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.
4. Pengetahuan manfaat mangrove (X_4) mempunyai nilai 1,779. Hal ini berarti bahwa nilai variabel lain (X_1, X_2, X_3, X_5) konstan atau tidak berubah, maka setiap kenaikan satu unit angka variabel pengetahuan manfaat mangrove terbakukan atau berakibat naiknya nilai sebesar 1,779 pada variabel tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

5. Kebijakan dan himbuan Pemda (X5) mempunyai nilai 0,920. Hal ini berarti bila nilai variabel lain (X1, X2, X3, X4) konstan atau tidak berubah, maka setiap kenaikan satu unit angka variabel kebijakan dan himbuan Pemda terbakukan akan berakibat naiknya nilai sebesar 0,920 pada variabel tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

Analisa varian kontribusi faktor-faktor terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove menunjukkan nilai F hitung sebesar 103,613 dan F tabel 0,01% sebesar 6,85. Oleh karena F hitung > F tabel, berarti H_0 ditolak dan menerima H_1 . Ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat nyata.

N. Implikasi Perencanaan Pemantapan Pengelolaan Hutan Mangrove Di kabupaten Kotabaru

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Utara kabupaten Kotabaru menunjukkan rerata skor yang cukup baik yakni 21,49 (sedang) rerata tersebut didukung secara signifikan oleh faktor kebijakan dan himbuan pemda dan aturan tradidisi di masyarakat serta faktor pendidikan formal. Variabel ini secara bersama-sama terbukti menyumbang nilai koefisien regresi t tertinggi yakni 4,213 dan 4,071 dibandingkan dengan variabel lainnya dalam penelitian ini. Variabel lainnya yakni tingkat pengetahuan mangrove dengan nilai koefisien regresi t sebesar 3,594, tingkat pendapatan perkapita sebesar 2,638 dan variabel jumlah anggota keluarga sebesar – 1,392.

Berdasarkan hal tersebut untuk menjaga dan mengelola kelestarian hutan mangrove yang berkelanjutan diperlukan pengambilan langkah-langkah yang selalu melibatkan atau mengakomodasi partisipasi masyarakat setempat untuk menyusun strategi/perencanaan ke depan bagi upaya peningkatan kesadaran warga masyarakatnya untuk lebih berperan serta dalam segala aktivitas pembangunan lingkungan khususnya dalam pengelolaan hutan mangrove. Langkah-langkah perencanaan yang dibuat harus mampu menyentuh kesemua lapisan atau strata sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Aspek kehadiran aparat pemda Kabupaten Kotabaru dalam wujud produk hukum dan implementasi produk hukum di lapangan serta kegiatan dilapangan tetap harus dibutuhkan dan ditingkatkan mengingat di masa-masa mendatang permasalahan keberadaan hutan mangrove dengan segala persoalan yang menyertainya yang semakin meningkat dan rumit.

UPT-PISTAK-INDIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, 1976. Transmigrasi dan Penduduk Setempat Di Aceh. Suatu Studi Mengenai Hubungan Diantara Mereka. Laporan Penelitian Proyek Research Departemen P dan K Darusalam Banda Aceh.
- Ancok, J. 1992. Teknik Penyusunan Skala Pengukur. PPK. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Anonimous, 2000. Kabupaten Kotabaru Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru. Kotabaru. Kalimantan Selatan.
- , 1989. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kantor Menteri Negara lingkungan Hidup/Bapedal. Jakarta.
- Arstein, Shery R., 1969. A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners. 35. July.
- Clark, J., 1974. Coastal Ecosystem. Ecological Consideration For Management Of The Coastal Zone. The Conservation Foundation. Washington D.C.
- Cohen, J and Up Hoff, N.T., 1979. Rural Development and Participation Concept and Measurement For Project Design Implementation and Evalution, Cornel University, New York.
- Daly. E.H. dan John Cobb, 1989. Redirecting The Economy Toward Community, The Environment and A Sustainable Future, Boston, Beacon Press Book.
- Davis, K., 1977. Human Relation At Work Organization Behavior, McGraw Hill Book Kogakusha, Tokyo.
- Hadi, S.P., 1989. Aspek Sosial Amdal, Sejarah, Teori dan Metode, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- , 2001. Dimensi Lingkungan. Perencanaan Lingkungan Pembangunan. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamilton, L.S. and S.C. Snedaker (eds). 1984. Handbook For Mangrove Area Management. Enviroment and Policy Institute. East West Center. Honolulu. Hawai.

- Hardjosoemantri, K., 1983. Aspek Hukum Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Harjosuwarno, S. 1993. Hutan Mangrove Segara Anakan. Cilacap. Suatu Tinjauan Kedaaan Sekarang dan Perkembangannya Pada Masa Mendatang. Dalam Prosiding Seminar II Ekosistem Mangrove. LIPI, Jakarta.
- Gazalba. S, 1989. Masyarakat Islam, Pengantar Sosialogi dan Sosiografi, Bulan Bintang. Jakarta.
- Knox, G.A. and T. Miyabara. 1984. Coastal Zone Resources Development dan Conservation In Southeast Asia. UNESCO Regional Office For Science an Technology For Southeast Asia. Jakarta. Indonesia.
- Nazir, M., 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nybakkaen, J.W. 1982. Biologi Laut. Penerbit Gramedia. Jakarta.
- Odum, E.P. 1971. Fundamentals Of Ecology. Penterjemah: Tjahjono Samingan, 1993. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Rahardja. M.D. 1988. Pesantren dan Pembaharuan, LP3ES. Jakarta.
- Saenger, P., E.J. Hegerl and J.D.S. Davie (eds). 1983. Global Status Of Mangrove Ecosystem. IUCN-UNEP & WWF.
- Said. H.M. 1989. Ilmu Pendidikan, Penerbit AlumniBandung.
- Santoso, S., 2002. SPSS Versi 10. Penerbit PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sastropoetro, R. AS., 1986. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Penerbit Alumni. Bandung.
- Singarimbun, M., dan Effendi, S., 1995. Metode Penelitian Survei. LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Soemarwoto, O., 1984. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit Djambatan. Jakarta.